

**TINJAUAN *FIQH SIYASAH* TENTANG PELAKSANAAN FUNGSI
BAPPEDA DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN
(Studi di Kabupaten Lampung Barat)**



Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna
Mendapatkan Gelas Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Ilmu Syari'ah

Oleh:
Heryanti
NPM: 1421020077

Jurusan: Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1440 H/2018 M**

**TINJAUAN *FIQH SIYASAH* TENTANG PELAKSANAAN FUNGSI
BAPPEDA DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN
(Studi di Kabupaten Lampung Barat)**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna
Mendapatkan Gelas Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Ilmu Syari'ah



Pembimbing I: Dr. H. Bunyana Sholihin. M.Ag.

Pembimbing II: Drs. H. Zikri

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1440 H/2018 M**

ABSTRAK

Badan perencanaan dan pembangunan daerah (Bappeda) memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan daerah, karena lembaga inilah yang bertanggungjawab dalam hal pelaksanaan pembangunan daerah sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya. Bappeda adalah lembaga teknis daerah dibidang penelitian dan perencanaan pembangunan daerah yang dipimpin oleh seorang kepala badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah. Selain itu, Bappeda merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan merupakan organisasi perangkat daerah, dan keberadaannya sebagai unsur penunjang pemerintah dibidang perencanaan pembangunan daerah. Tugas pokok dan fungsi Bappeda Kabupaten Lampung Barat adalah membantu bupati dalam menentukan arah dan kebijakan di bidang perencanaan daerah, hal ini ditekankan karena mengingat pembangunan di wilayah Kabupaten Lampung Barat dirasakan belum maksimal dan merata.

Tujuan penelitian ini adalah ingin mengetahui bagaimana BAPPEDA memproses perencanaan pembangunan di daerah Kabupaten Lampung Barat, kemudian ingin mengetahui bagaimana tinjauan *fiqh siyasah* tentang pelaksanaan fungsi BAPPEDA dalam proses perencanaan pembangunan di daerah Kabupaten Lampung Barat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan sifat penelitiannya *deskriptif*. Tehnik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian hasilnya dianalisis secara *kualitatif*.

Pelaksanaan fungsi BAPPEDA dalam Proses perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Lampung Barat adalah melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan tingkat Desa/Kelurahan, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan, Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten.

Tinjauan *Fiqh Siyasah* dalam Mewujudkan Pelaksanaan fungsi Perencanaan pembangunan daerah di BAPPEDA Kabupaten Lampung Barat sudah berjalan sesuai dengan *fiqh siyasah* karena berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa BAPPEDA Kabupaten Lampung Barat telah menjalankan tugas dan perannya sesuai dengan Keputusan Presiden No. 27 Tahun 1980. Hal tersebut dilihat dari tugas BAPPEDA Kabupaten Lampung Barat dalam melakukan pembangunan yang juga disesuaikan dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah tahun 2017 yang dibuat oleh BAPPEDA mengarah kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah tahap ke dua (2017-2022). Namun berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara, masih ada beberapa indikator yang belum berjalan dengan maksimal, seperti ketergantungan dana dari pusat menyebabkan tidak tepatnya jadwal penyusunan Rencana Anggaran Pembangunan Daerah, karena penyusunan anggaran daerah bergantung kepada dana dari pusat.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung, 35131

PERSETUJUAN

Tim Pembimbing, setelah mengoreksi dan memberikan masukan-masukan secukupnya, maka skripsi saudara:

Nama : Heryanti
NPM : 1421020077
Prodi : Siyasah
Fakultas : Syariah
Judul : **TINJAUAN FIQH SIYASAH TENTANG PELAKSANAAN FUNGSI BAPPEDA DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN (Studi di Kabupaten Lampung Barat).**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I,

Pembimbing II

Dr. H. Bunyana Sholihin. M.Ag.
NIP. 195707051989031001

Drs. H. Zikri
NIP. 196808271994031004

Ketua Jurusan Siyasah

Drs Susiadi AS., M.Sos.I
NIP. 195808171993031002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukaramo 1 Bandar Lampung, 35131

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul : **Tinjauan Fiqh Siyasah Tentang Pelaksanaan Fungsi Bappeda**
Dalam Perencanaan Pembangunan (Studi di Kabupaten Lampung Barat), **disusun oleh**
Heryanti, NPM : 1421020077, Jurusan Siyasah Syar'iyah, telah diujikan
dalam sidang munaqasah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung
pada hari/tanggal : Senin/18 Juni 2018.

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang : Marwin. S.H., M.H.

Sekretaris : Dr Agus Hermanto, M.H.I.

Penguji I : Dr. Liky Faizal. S.Sos., M.H..

Penguji II : Dr. H. Bunyana. Sholihin. M.Ag.

Mengetahui

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197009011997031002

MOTTO

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٦﴾ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ ﴿٧﴾ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ ﴿٨﴾

Artinya:....*Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, Maka apabila kamu Telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, Dan Hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap. (QS Al-Insyirah: 6-8)*¹



¹Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2008), h. 596.

PERSEMBAHAN

Ku persembahkan Skripsi ini kepada:

1. Kedua orangtua ku tersayang Ayahanda Zainal Abas dan teristimewa Ibunda Nurmala yang telah bersusah payah mengandung, melahirkan, mengasuh, merawat, membimbing serta mendidik putra-putrinya dalam keadaan suka maupun duka. Dan yang selalu mendo'akan untuk keberhasilanku dalam menyelesaikan Studi. Cucuran keringat dan pengorbanan serta do'a yang telah menghantarkanku menuju gerbang keberhasilan menyelesaikan Studi di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Kakak ku tersayang, Deri Antoni dan Adik ku Julisa Septiani. Serta seluruh keluarga dan kerabat yang selalu memberi dukungan dan do'a sehingga menjadi motivasi keberhasilanku.
3. Almamater Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang saya cintai dan saya banggakan.

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Heryanti, lahir di Pekon Kenali, Kecamatan Belalau, Kabupaten Lampung Barat pada tanggal 08 Juni 1994. Merupakan anak kedua dari tiga bersaudara, dengan saudara kandung laki-laki bernama Deri Antoni dan Saudara Kandung perempuan bernama Julisa Septiani. Lahir dari pasangan suami isteri ayahanda Zainal Abas dan Ibunda Nurmala. Sekarang bertempat tinggal di Jl Pulan Pandan No. 23 Way Dadi Sukarame Kota Bandar Lampung.

Mulai menempuh pendidikan formal di SD N 2 Kenali Kecamatan Belalau, Kabupaten Lampung Barat tamat pada tahun 2007, kemudian melanjutkan pendidikan di SMP N 1 Belalau Kabupaten Lampung Barat tamat pada tahun 2010, lalu melanjutkan pendidikan di SMA N 1 Belalau Kabupaten Lampung Barat tamat pada tahun 2013.

Pada tahun 2014 Melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Dan memilih prodi Siyasah Syar'iyah (Hukum Tatanegara) di Fakultas Syariah.

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat, rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, penyusunan skripsi yang berjudul “Tinjauan Fiqh Siyasah Tentang Pelaksanaan Bappeda dalam Perencanaan Pembangunan (Studi di Kabupaten Lampung Barat)” dapat selesai dengan baik.

Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada nabi Muhammad SAW. Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak mengalami kendala, namun berkat bantuan, bimbingan, kerjasama dari berbagai pihak dan berkah dari Allah SWT sehingga kendala-kendala yang dihadapi tersebut dapat di atasi. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

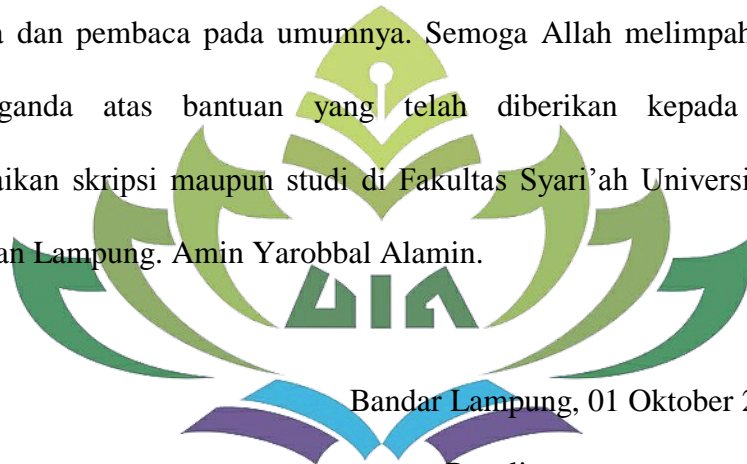
1. Bapak Prof. Dr. Moh. Mukri, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis menimba ilmu pengetahuan di kampus tercinta ini.
2. Dekan Fakultas Syari’ah bapak Dr. Alamsyah, S.Ag.,M.,Ag serta para wakil Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Ketua jurusan Siyasah Syar’iyyah bapak Drs Susiadi AS.,M. Sos.I dan sekretaris jurusan bapak Frenki M.Si.
4. Pembimbing I bapak Dr, H. Bunyana Sholihin. M.Ag. dan pembimbing II bapak Drs. H. Zikri yang telah banyak meluangkan waktu dalam membimbing mengarahkan dan memotivasi hingga skripsi ini selesai.

5. Bapak dan Ibu Dosen, beserta seluruh civitas akademika Fakultas Syariah Raden Intan Lampung yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis.
6. Kepala perpustakaan UIN Raden Intan Lampung dan kepala perpustakaan Fakultas Syariah atas diperkenalkannya peneliti meminjam literatur yang dibutuhkan.
7. Kepala Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bandar Lampung dan Kabupaten Lampung Barat beserta staf-staf jajarannya yang telah memberikan izin penelitian dalam rangka penyusunan skripsi ini.
8. Kepala Bappeda Ir. Okmal M.Si dan Bapak Agustanto Basmar, SP, M.Si selaku Sekretaris BAPPEDA Kabupaten Lampung Barat yang telah membantu dalam penelitian sehingga skripsi ini bisa terselesaikan.
9. Jajaran Pegawai BAPPEDA, dan Instansi yang terkait di Kabupaten Lampung Barat yang telah memberikan informasi dan membantu penulis dalam melakukan riset atau penelitian.
10. Teman temanku, Anjeli Adelia, Sri Maryani, Eria Kurniawati, Eka Yurida, Ria Anggraini, Nevi Ermita, dan keluarga besar siyasa B dan masih banyak lagi yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang selalu memberikan motivasi, dorongan, dan selalu meluangkan waktu untuk membantu menyelesaikan skripsi atau hanya untuk sekedar menemani dan menghibur ketika dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Berbagai pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung, demi terwujudnya kelulusan ini. Allah Maha Adil, semoga Allah SWT,

membalas semua kebaikan kalian, dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, Aamiin.

12.Sahabat ku Dewi, Boy,Ijal,Candra,Agus, dan masih banyak lagi yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang selalu mendukung, mensupport dan meluangkan waktu untuk membantu menyelesaikan skripsi atau hanya untuk sekedar menemani dan menghibur ketika dalam penyelesaian skripsi ini.

Demikianlah mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya dan pembaca pada umumnya. Semoga Allah melimpahkan pahala yang berlipat ganda atas bantuan yang telah diberikan kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi maupun studi di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Amin Yarobbal Alamin.



Bandar Lampung, 01 Oktober 2018

Penulis

Heryanti

NPM. 1421020077

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERSETUJUAN.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	4
C. Latar Belakang Masalah.....	5
D. Rumusan Masalah	17
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	17
F. Metode Penelitian.....	18

BAB II FIQH SIYASAH DAN PELAKSANAAN BAPPEDA

DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN

A. Pengertian Fiqh Siyasah	27
B. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah	29
C. Kedudukan Fiqh Siyasah dalam Sistemika Hukum Islam	32
D. Perencanaan Pembangunan dalam <i>Fiqh Siyasah</i>	34
E. Pembangunan dalam <i>Fiqh Siyasah</i>	37
F. Perencanaan.....	40
1. Fungsi Perencanaan	43
2. Faktor Penghambat Dalam Perencanaan	48
G. Perencanaan Pembangunan Daerah	49

1. Tujuan dan Fungsi Perencanaan Pembangunan	52
2. Jenis Perencanaan Pembangunan	52
3. Tahapan Perencanaan Pembangunan	57
H. Pembangunan.....	59
I. Kedudukan, Tugas dan Fungsi BAPPEDA	63

BAB III LAPORAN PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Lampung Barat	69
1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi	69
2. Letak dan Kondisi Geografis	70
3. Demografi	71
B. Gambaran Umum Bappeda Kabupaten Lampung Barat	73
1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	73
2. Struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	74
3. Sarana Dan Prasarana Bappeda.....	89
C. Pelaksanaan Bappeda dalam Pembangunan di Kabupaten Lampung Barat	90
1. Proses Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	92
2. Proses Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) di Kabupaten Lampung Barat.....	93
D. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap proses perumusan kebijakan teknis.....	94
1. Faktor Pendukung	94
2. Faktor Penghambat.....	98

BAB IV ANALISIS

A. Proses BAPPEDA dalam Perencanaan Pembangunan	103
B. Tinjauan Fiqh Siyasah tentang Pelaksanaan BAPPEDA dalam Proses Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Lampung Barat	105

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	110
B. Saran.....	111

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum mengadakan pembahasan lebih lanjut tentang skripsi ini terlebih dahulu akan dijelaskan pengertian judul guna mendapat gambaran yang jelas dan memudahkan dalam memahami skripsi ini.

Untuk menghindari kemungkinan terjadinya kesalahan interpretasi dikalangan pembaca terhadap judul Skripsi ini, maka penulis perlu mengemukakan pengertian judul sebagai berikut : **Tinjauan Fiqh Siyasah Tentang Pelaksanaan Fungsi BAPPEDA Dalam Perencanaan Pembangunan (Studi Di Kabupaten Lampung Barat).**

Tinjauan adalah “pemeriksaan yang diteliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan.”¹

Fiqh Siyasah adalah “salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.”

Tinjauan Fiqh Siyasah adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk meneliti dan mengkaji aspek tentang pedoman kehidupan manusia dalam bernegara berdasarkan hukum Islam.²

¹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 590.

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Mojone dan Wildavsky mengemukakan pelaksanaan sebagai evaluasi. Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan.³

Fungsi adalah kegunaan suatu hal, daya guna, jabatan (pekerjaan) yang dilakukan, kerja suatu bagian tubuh.⁴

*Bappeda adalah lembaga teknis daerah dibidang penelitian dan perencanaan pembangunan daerah yang dipimpin oleh seorang kepala badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah. Badan ini mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang penelitian dan perencanaan pembangunan daerah.*⁵

*Perencanaan adalah “proses pengambilan keputusan atas sejumlah alternatif (pilihan) mengenai sasaran dan cara yang akan dilaksanakan dimasa yang akan datang guna mencapai tujuan yang dikehendaknya, serta pemantauan dan penilaiannya atas hasil pelaksanaannya, yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan.”*⁶

Banyak pendapat tentang perencanaan pembangunan, antara lain pendapat yang dikemukakan oleh Sondang P Siagian, Menurutnya perencanaan adalah

²Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah; Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2014), Cet Ke-1. h. 4.

³Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 70.

⁴Setya Nugraha, Maulina, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Karina), h. 198.

⁵https://id.m.wikipedia.org/wiki/Badan_Perencanaan_Pembangunan_Daerah (diakses pada tanggal 04 februari 2018, pukul 19:00 WIB)

⁶Husaini Usman, *Manajemen*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h.49.

“keseluruhan proses pemikiran penentuan secara matang dari hal-hal yang akan dikerjakan dimasa yang akan datang dalam rangka yang telah ditentukan”.⁷

Sondang P Siagian, mendefinisikan pembangunan adalah “suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa Negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*notton building*)”.⁸

Perencanaan Pembangunan adalah suatu tahapan awal dalam proses pembangunan. Sebagai tahapan awal, perencanaan pembangunan akan menjadi bahan pedoman atau acuan dasar bagi pelaksanaan pembangunan (*action plan*). Dalam hubungannya dengan suatu daerah sebagai wilayah pembangunan dimana terbentuk konsep perencanaan pembangunan daerah, dapat dinyatakan bahwa perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses perencanaan pembangunan yang dimaksudkan melakukan perubahan menuju arah perkembangan yang lebih baik bagi suatu komunitas masyarakat, pemerintah, dan lingkungannya dalam wilayah atau daerah tertentu, dengan memanfaatkan atau mendayagunakan berbagai sumber yang ada, dan harus memiliki orientasi yang bersifat menyeluruh, lengkap, tetapi tetap berpegang pada azas perioritas.⁹

⁷Sondang P Siagian, *Administrasi Pembangunan* (Jakarta: Gunung Agung, 1983) Cet ke-10, h. 18.

⁸*Ibid.* h. 2.

⁹Riyadi, Deddy Supriyadi Bratakusumah, *Perencanaan Pemabangunan Daerah (Strategi Menggali Potensi dalam Mewujudkan Otonomi Daerah)* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003), h. 7.

Jadi dengan demikian, pengertian dari judul ini adalah meninjau bagaimana BAPPEDA Kabupaten Lampung Barat dalam melakukan pelaksanaan fungsi dan memproses perencanaan pembangunan ditinjau dalam *fiqh siyasah*.

B. Alasan Memilih Judul

Adapun alasan penulis memilih judul tersebut adalah sebagai berikut :

1. Secara Objektif

a. Badan perencanaan pembangunan daerah merupakan hal yang sangat berperan penting dalam pembangunan dan hal yang menentukan arah kebijaksanaan pemerintah daerah dalam bidang perencanaan pembangunan di daerah. Dengan demikian Bappeda dituntut untuk berperan secara aktif, efektif, dan efisien dalam meletakkan kerangka dasar pembangunan di daerah yang kokoh untuk dapat mewujudkan keberhasilan pembangunan.

b. Bappeda di kabupaten Lampung Barat berperan penting dalam pembangunan. Namun dalam kenyataannya pelaksanaan fungsi Bappeda kurang begitu terlihat sehingga banyak pembangunan yang semestinya didukung oleh masyarakat akan tetapi dalam pelaksanaannya kurang didukung oleh masyarakat. Sedangkan tujuan pembangunan tidak akan tercapai jika pembangunan hanya dilakukan oleh pemerintah saja, tanpa adanya keterlibatan masyarakat setempat.

2. Secara Subjektif

a. Objek penelitian mudah dijangkau, karena penelitian baik data yang bersifat teori maupun data lapangan cukup banyak.

- b. Sesuai dengan jurusan yang ditekuni yaitu Siyasah. Siyasah adalah jurusan yang membahas tentang ilmu politik.

C. Latar Belakang Masalah

Bappeda adalah lembaga teknis daerah dibidang penelitian dan perencanaan pembangunan daerah yang dipimpin oleh seorang kepala badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah. Badan ini mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang penelitian dan perencanaan pembangunan daerah. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dibentuk berdasarkan kebutuhan, perkembangan dan kemajuan di Bidang Pemerintahan serta kemajuan teknologi dewasa ini, dalam rangka membantu pemerintah daerah melaksanakan pembangunan, khususnya di bidang pemerintahan.¹⁰

Sesuai dengan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, telah memberikan wewenang dan keleluasan bagi Pemerintah Daerah untuk merencanakan dan menetapkan sepenuhnya kebijakan dan program daerahnya. Dengan adanya otonomi daerah maka pemerintahan daerah dituntut lebih mandiri, sehingga berbagai perintis pembangunan daerah kearah tujuan dan kesuksesan akan menjadi agenda penting yang harus disiapkan pemerintah oleh pemerintah daerah. Untuk mencapai tujuan dan kesuksesan tersebut maka

¹⁰ https://id.m.wikipedia.org/wiki/Badan_Perencanaan_Pembangunan_Daerah (diakses pada tanggal 04 februari 2018, pukul 19:00 WIB)

diperlukan perencanaan untuk menetapkan tujuan dan memilih langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut.¹¹

Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses penyusunan tahapan-tahapan yang melibatkan berbagai unsur di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber-sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah atau daerah dalam jangka waktu tertentu.¹² Mekanisme perencanaan pembangunan, sangat diperlukan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Tujuan dari perencanaan pembangunan adalah menjadikan program pembangunan tepat dengan arah yang dituju. Urgensi dari perencanaan itu adalah agar rencana dari pembangunan yang akan dijalankan tersusun dengan baik dan sistematis, sehingga dalam pelaksanaannya mudah melakukan pengontrolan.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) sebagai lembaga yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana diatur dalam Undang-undang No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) bertanggungjawab dalam penyusunan rencana, penetapan rencana, pengendalian pelaksanaan rencana dan evaluasi pelaksanaan pembangunan pada tingkat daerah.¹³

Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan potensi sekaligus mengurangi ketimpangan pembangunan antar

¹¹ Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

¹² Riyadi, Deddy Supriyadi Bratakusumah, *Op. Cit*, h. 7.

¹³ Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

daerah. Namun, dalam pelaksanaannya ternyata tidak mudah, terdapat banyak masalah antara lain terkait kurangnya konsistensi perencanaan dan materi hingga permasalahan di lapangan. Di samping itu ruang gerak Pemerintah daerah dalam perencanaan dan pengaturan pembangunan yang sesuai potensi dan prioritas daerah sebenarnya sangat terbatas.

Telah diketahui bahwa di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18 berbunyi:

Pembagian daerah Indonesia atas dasar besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-Undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintah Negara dan hak asal usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa, Sedangkan realisasi dari pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 untuk saat ini dijalankan oleh Undang-Undang nomor 5 tahun 1974 yaitu tentang pokok-pokok pemerintah di daerah.¹⁴

Pembangunan di daerah, kepala daerah selaku administrator dalam bidang pembangunan, dalam bidang administrasi, dalam bidang kemasyarakatan harus selalu merencanakan demi pembangunan dan kemajuan di daerahnya. Untuk lebih lancarnya pembangunan, kepala daerah dibantu oleh dinas-dinas daerah, juga dibantu badan yang berperan sangat penting dalam pembangunan.

Badan tersebut fungsinya antara lain adalah menentukan perencanaan-perencanaan yang ada kaitannya dengan masalah pembangunan daerah pada khususnya dan searah pula dengan program pembangunan nasional pada umumnya. Sedangkan badan perencanaan tersebut dikenal dengan nama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

¹⁴Undang-undang Dasar 1945, Bab VI, Pasal 18 (Surabaya: Pustaka Agung Harapan).

Pembangunan merupakan suatu proses yang harus dilaksanakan secara terus menerus, hal ini akan bisa tercapai dengan sempurna apabila disertai dengan program-program yang terencana. Untuk itulah maka sangat perlu diadakan pengelompokan program agar dalam perencanaan tersebut dapat menghasilkan pembangunan yang menyeluruh di suatu daerah.

Perencanaan tidak mesti dan terlaksana tanpa ada suatu alasan yang tepat, untuk itulah maka di dalam perencanaan sendiri perlu adanya alasan-alasan yang dapat menjadikan sumber terbentuknya perencanaan tersebut. Adapun sebagai alasan untuk adanya perencanaan adalah :

1. Adanya perencanaan diharapkan terdapatnya suatu pengarah kegiatan, adanya pedoman bagi pelaksanaan kegiatan yang ditujukan kepada pencapaian tujuan pembangunan.
2. Adanya perencanaan maka dilakukan suatu perkiraan terhadap hal-hal dalam masa pelaksanaan yang akan dilalui. Perkiraan dilakukan mengenai potensi-potensi dan prospek-prospek perkembangan tetapi juga mengenai hambatan-hambatan dan resiko-resiko yang mungkin di hadapi. Perencanaan mengusahakan supaya ketidakpastian dapat dibatasi sedikit mungkin.
3. Perencanaan memberikan kesempatan untuk memilih berbagai alternatif tentang cara yang terbaik (*the best alternatif*) atau kesempatan untuk memilih kombinasi cara yang terbaik (*the best combination*).
4. Perencanaan dilakukan penyusunan skala prioritas. Memilih urutan-urutan dari segi pentingnya suatu tujuan, sasaran maupun kegiatan usaha.

5. Adanya perencanaan maka akan ada suatu alat pengukur atau standar untuk mengadakan pengawasan evaluasi (*control/evaluation*)¹⁵.

Berbagai alasan mengadakan perencanaan di atas dapat dilihat bahwa perencanaan bertujuan sebagai pedoman bagi pelaksanaan yang akan dilakukan. Dalam melaksanakan kegiatan perencanaan disadari akan adanya hambatan-hambatan dan akan adanya suatu resiko-resiko yang disebabkan karena sangat terbatasnya sumber sektor pembangunan serta sulitnya koordinasi yang baik antara instansi yang bersangkutan.

Pemerintah Indonesia dari waktu ke waktu sedang terpacu untuk melaksanakan pembangunan disegala bidang dalam rangka menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Pemerintah mempunyai peran utama sebagai penggerak dalam pembangunan, yaitu dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional.

Pembangunan yang dimaksud bukan saja pembangunan berbentuk fisik tetapi mencakup pembangunan mental bangsa. Pembangunan tersebut tidak mungkin berjalan lancar sesuai dengan yang diharapkan apabila sistem pemerintahan tidak dibenahi sedemikian rupa. Karena dengan sistem pemerintahan yang baik dan teraturlah pembangunan dapat terlaksana dengan baik.

Pemberian otonomi kepada daerah sesuai dengan amanat UUD 1945 pasal 18 ayat 2 yang berbunyi Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota

¹⁵ Bintaro Tjokroamidjojo, *Perencanaan Pembangunan* (Jakarta: PT. Gunung Agung, 1986) Cet ke-9, h. 9.

mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.¹⁶

Mengingat hal tersebut maka salah satu upaya pemerintah dalam rangka memajukan pembangunan di daerah adalah dengan membentuk suatu badan yang bertugas khusus dalam perencanaan pembangunan yaitu melalui Keputusan Presiden No. 27 tahun 1980,¹⁷ tentang pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang disingkat BAPPEDA pada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (sekarang daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota) di seluruh tanah air yang kemudian dilebur dengan Peraturan Pemerintah RI No 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Bagian ke empat pasal 6 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Ketentuan umum UU No. 25 Tahun 2004 Pasal 1 menjelaskan bahwa perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia, sedangkan pembangunan nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Maka dapat disimpulkan sistem perencanaan pembangunan nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang

¹⁶Undang-Undang Dasar 1945, *Op. Cit.* Pasal 18 ayat (2).

¹⁷Keputusan Presiden No.27 Tahun 1980, Tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA).

dilaksanakan oleh unsur penyelenggara Negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah.¹⁸

Sistem perencanaan pembangunan daerah menjadi suatu hal yang sangat berpengaruh atas hasil akhir dari sebuah pembangunan. Realitasnya masih saja terdapat pembangunan daerah yang bermasalah karena buruknya penerapan sistem perencanaan pembangunan yang menghasilkan perencanaan yang tidak efektif.

Ruang lingkup perencanaan pembangunan nasional sesuai dengan UU No. 25 Tahun 2004 Pasal 3 ayat 1 yaitu perencanaan pembangunan nasional mencakup perencanaan makro semua fungsi pemerintah yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam Wilayah Negara Republik Indonesia. Serta disusun secara terpadu oleh Kementerian/Lembaga dan perencanaan pembangunan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.¹⁹ Penjelasan tersebut menegaskan bahwa pembangunan nasional merupakan akumulasi dari pembangunan daerah, dimana pada hakekatnya daerah menjadi tempat terlaksananya program-program pembangunan.

Arah pembangunan yang terencana dengan baik dan dinamis sangat dipengaruhi adanya peran serta masyarakat maupun unsur-unsur dalam masyarakat yang secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini jelas di atur dalam UU Nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional yang menjelaskan bahwa tata cara

1. ¹⁸ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal

¹⁹ *Ibid.* Pasal 3.

perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintah/perangkat daerah di pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat.

Melaksanakan pembangunan bukanlah suatu pekerjaan yang cukup mudah, namun sebaliknya adalah salah satu pekerjaan yang sangat berat dan sulit. Oleh sebab itu dibutuhkan tenaga dan pikiran yang benar-benar mampu dan sesuai dengan tugas dan wewenang yang menjadi tanggungjawabnya, untuk itu dibutuhkan orang-orang yang mempunyai dedikasi, kejujuran dan tanggungjawab akan pelaksanaan tugas dan wewenang yang di emban oleh setiap penyelenggara pemerintahan di daerah maupun dipusat agar fungsi Bappeda dapat berjalan maksimal sebagai badan yang berperan penting dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

Kabupaten Lampung Barat yang merupakan objek daerah penelitian ini adalah salah satu kabupaten di Provinsi Lampung, Indonesia. Kabupaten ini dibentuk berdasarkan UU No. 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara RI No. 3452); dan pada Tahun 2012 mengalami pemekaran menjadi DOB Pesisir Barat melalui UU No. 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara RI Tahun 2012 No. 231, Tambahan Lembaran Negara RI No: 5364). Saat ini,

Kabupaten Lampung Barat telah banyak mengalami kemajuan dari berbagai aspek baik teknologi, politik, ekonomi, sosial, maupun budaya. Kemajuan tersebut tidak terlepas dari peran perencanaan pemerintah dalam pembangunan, dalam hal ini Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) beserta seluruh pemangku kepentingan yang terkait. Oleh karena itu maka pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan di daerah Kabupaten Lampung Barat sangat diperlukan dalam melaksanakan pembangunan secara merata dengan otonomi yang seluas-luasnya.

Peran serta masyarakat sebagai wujud dari keseriusan masyarakat mengawal jalannya pembangunan perlu didukung dengan tersedianya ruang partisipasi publik dalam memberikan masukan-masukan yang mencerminkan aspirasi masyarakat. Sebagaimana dipaparkan di atas, maka untuk meningkatkan kualitas implementasi pembangunan di kabupaten lampung barat perlu juga di dorong dengan sumber daya manusia (SDM) yakni pegawai-pegawai yang ada pada jajaran bappeda dalam menjalankan fungsinya.

Hal ini bersentuhan dengan hasil yang akan dicapai, karena sumber daya manusia merupakan faktor yang sangat berpengaruh dalam sebuah perencanaan pembangunan. Mengingat tanpa adanya SDM maka suatu perencanaan dan pembangunan takkan berjalan dengan sendirinya. Hal ini ditekankan karena mengingat pembangunan fisik di wilayah Kabupaten Lampung Barat dirasakan belum maksimal dan merata.

Pembangunan dikatakan belum maksimal dan merata dikarenakan masih ada beberapa indikator yang belum berjalan dengan maksimal, seperti ketergantungan

dana dari pusat menyebabkan tidak tepatnya jadwal penyusunan Rencana Anggaran Pembangunan Daerah, karena penyusunan anggaran daerah bergantung kepada dana dari pusat.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 63 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan pembangunan Daerah, Bappeda merupakan Unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah. Dalam melaksanakan musrenbang Kabupaten Lampung Barat ini memiliki dasar hukum dan tujuan yaitu:

1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan nasional.
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah.
3. Peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan tata cara penyusunan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
4. Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah .
5. Permendagri nomor 50 tahun 2010 tentang pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2008.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dilihat dengan jelas bahwa pelaksanaan tugas dan perencanaan pembangunan merupakan tanggung jawab kepala Bappeda. Dengan demikian tugas Bappeda berdasarkan peraturan bupati lampung barat nomor 63 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,

Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan pembangunan Daerah. Maka tugas Badan Perencanaan pembangunan daerah adalah membantu bupati dalam menentukan arah dan kebijakan di bidang perencanaan daerah.²⁰ Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis dibidang perencanaan pembangunan;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan pembangunan;
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan pembangunan;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Terkait dengan arti dan kedudukan perencanaan dalam sebuah pembangunan dalam kajian Islam, sebelum merencanakan sebuah pembangunan yang mana hal ini merupakan sesuatu yang universal kita juga harus mempunyai perencanaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehubungan dengan hal ini sebagaimana dalam firman Allah SWT :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ

²⁰Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 63 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan pembangunan Daerah.

إِنَّ اللَّهَ خَيْرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang Telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS Al-Hasyr :18)²¹

Menurut Syaikh Ahafiyyurrahman al-mubarakfuri مَا قَدَّمْتَ لِغَدٍ yang artinya memperhatikan apa yang telah dilakukan untuk hari esok pada firman Allah tersebut dapat kita tafsirkan dan kita buktikan bahwa al-qur’an telah memperkenalkan teori perencanaan baik berkaitan dengan perencanaan dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat. Dalam tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa intrpeksilah diri kalian sebelum kalian diintropeksi dan lihatlah amalan apa yang telah kalian simpan untuk bekal hari kiamat.²²

Dari penjelasan ayat di atas, bahwa manusia diperintahkan untuk memperbaiki dirinya, untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, dimana proses kehidupan manusia tidak boleh sama dengan kehidupan yang sebelumnya (kemarin). Di samping itu kata *perhatikanlah* mengandung makna bahwa manusia harus memperhatikan dari setiap perbuatan yang dia kerjakan, serta harus mempersiapkan diri (merencanakan) untuk selalu berbuat yang terbaik demi hari esok.

²¹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2008), h. 548.

²² Syaikh Ahafiyyurrahman al-mubarakfuri, *Syarh Tafsir Ibnu Katsir* (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2011) Cet ke-IV. h. 36.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana BAPPEDA memproses perencanaan pembangunan di daerah Kabupaten Lampung Barat ?
2. Bagaimana tinjauan *fiqh siyasah* tentang pelaksanaan fungsi BAPPEDA dalam proses perencanaan pembangunan di daerah Kabupaten Lampung Barat.

E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian :

- a. Untuk mengetahui bagaimana BAPPEDA memproses perencanaan pembangunan di daerah Kabupaten Lampung Barat.
- b. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan *fiqh siyasah* tentang pelaksanaan fungsi BAPPEDA dalam proses perencanaan pembangunan di daerah Kabupaten Lampung Barat.

2. Kegunaan Penelitian :

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dan praktis sebagai berikut :

1. Memberikan manfaat akademis dalam bentuk sumbang saran untuk perkembangan ilmu pemerintahan pada umumnya dan untuk bidang penyusunan perencanaan pembangunan di daerah demi meningkatkan peran serta masyarakat sebagai objek dan subjek pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan rakyat.
2. Sebagai bahan masukan dan sumbang pemikiran yang diharapkan bermanfaat bagi pemerintah khususnya Badan Perencanaan dan

Pembangunan Daerah dalam menangani masalah penyusunan perencanaan pembangunan daerah.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam skripsi ini penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu “penelitian yang langsung dilakukan dilapangan atau pada responden.”²³

Proses penelitian ini mengangkat data dan permasalahan yang ada secara langsung, tentang berbagai hal yang berhubungan pada permasalahan yang akan dibahas secara rasional, sistematis, dan teoritis. Dalam hal ini penelitian dilakukan pada pegawai yang bekerja di Bappeda Kabupaten Lampng Barat.

2. Sifat Penelitian :

Penelitian ini bersifat *deskriptif* yakni “suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara objektif dari objek penelitian.”²⁴ Secara sederhana dapat dikatakan bahwa penelitian ini bersifat deskriptif eksploratif riset yang mengklasifikasikan data yang bersifat kualitatif.

Penelitian ini dimaksudkan untuk menerangkan dan menggambarkan kondisi objektif pelaksanaan fungsi BAPPEDA dalam Perencanaan

²³Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi dan Aplikasinya* (Bogor : Ghalia Indonesia, 2002), h. 11.

²⁴Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial* (Bandung : Mandar Maju, 1996) Cet ke.-7, h. 29.

Pembangunan, Bappeda memproses Perencanaan pembangunan di Kabupaten Lampung Barat.

3. Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan pada penelitian ini ada dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer :

Data primer adalah “data utama yang digunakan peneliti untuk memperoleh jawaban atas masalah penelitian yang sedang dikaji”. Sumber data primer adalah data utama dalam suatu penelitian, digunakan sebagai pokok yang diperoleh melalui interview dan observasi,²⁵ dalam penelitian ini untuk menjadi sumber data primer adalah pegawai Bappeda.

Data primer dalam studi lapangan pada penelitian ini didapatkan dari hasil pengamatan (*observasi*) berupa catatan peristiwa serta situasi pada waktu penelitian berlangsung. Wawancara (*interview*) berupa pertanyaan yang diajukan penulis kepada responden, serta penyelidikan terhadap permasalahan penelitian, dan partisipasi artinya peneliti ikut serta dalam kegiatan masyarakat tersebut supaya lebih mendapatkan data penelitian yang lebih akurat.

²⁵Nanang Martono, *Metode Penelitian Sosial Konsep-konsep Kunci*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015) Cet. Ke-1, h. 250.

Jadi data primer berupa hasil observasi, hasil wawancara dan juga dokumen-dokumen asli yang berkaitan dengan Bappeda Kabupaten Lampung Barat.

b. Data Sekunder :

Sedangkan data sekunder menurut Abdurrahmat Fhatoni adalah data yang sudah jadi biasanya telah tersusun dalam bentuk dokumen, misalnya mengenai data demografis suatu daerah dan sebagainya.²⁶

Data Sekunder adalah data yang dipergunakan untuk mendukung data primer yang diperoleh melalui studi pustaka yang berasal dari buku-buku, penelitian lapangan, maupun dokumen-dokumen atau arsip yang berkaitan dengan objek penelitian. Dokumen yang terkait dengan penelitian ini berupa Tugas Pokok dan fungsi BAPPEDA, Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1980 Tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan

²⁶ Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: Mandar Maju, 2002), h. 21.

oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.²⁷

Suharsimi Arikunto berpendapat bahwa yang dimaksud dengan populasi adalah “keseluruhan objek penelitian”.²⁸

Populasi digunakan untuk menyebutkan seluruh elemen/anggota dan seluruh wilayah yang menjadi sasaran penelitian.²⁹ Adapun Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Pegawai bappeda.

b. Sampel

Teknik sampling yang digunakan adalah teknik non random sampling yaitu tidak semua individu dalam populasi diberi peluang yang sama untuk ditugaskan menjadi anggota sampel.³⁰ Cara ini dianggap paling tepat untuk dipilih menjadi anggota sampel sehingga keobjektifan hasil penelitian dapat terjamin.

Sampel yang digunakan adalah *Purposive Sampling*, yaitu tertentu yang dipandang memiliki sangkut paut dengan permasalahan yang diteliti.³¹ Sampel diambil tidak secara acak, melainkan ditentukan sendiri oleh peneliti, karena peneliti hanya akan mengambil sampel dengan beberapa pihak yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti. Yang menjadi sampel adalah 7 orang dari pegawai Bappeda dan masyarakat sekitar yaitu 1

²⁷Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&R*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 117.

²⁸Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), Cet, Ke-4 Edisi Revisi III, h. 62.

²⁹Juliansyah, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 147.

³⁰Hadi Sutrisno, *Metodologi Research I*, (Yogyakarta: YP Fak. Psikologi UGM, 1985), H. 89.

³¹Kontjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 1981), h. 42.

Kepala Bappeda, 1 Sekretaris Bappeda, 1 Kepala Bidang penelitian pengembangan dan statistik Bappeda, 1 komisi III DPRD, 1 Camat, 1 Kepala Desa, 1 Warga sekitar.

Selain responden, untuk menambah data-data yang dibutuhkan peneliti menggali informasi dari para informan. Informan dalam penelitian ini sendiri yaitu Pegawai Bappeda Lampung Barat. Para informan ini peneliti pilih karena bagi peneliti mereka dapat mewakili dari masing-masing kategori tersebut.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah melakukan pengamatan secara langsung ke obyek penelitian untuk mengetahui dari dekat kegiatan yang dilakukan. Observasi menurut Kartini Kartono³² adalah “studi sengaja dan sistematis fenomena sosial dan gejala-gejala alam dengan jalan pengamatan dan pencatatan”. Sedangkan Karl Weick, mendefinisikan observasi sebagai “penelitian, pengubahan, pencatatan dan pengodean serangkaian perilaku dan suasana yang berkenaan dengan organisme tertentu, sesuai dengan tujuan-tujuan empiris”.³³

Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan apabila, penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja gejala-gejala

³²Kartini Kartono, *Op. Cit.* h. 157.

³³Jalaludin Rahmat, *Metodologi Penelitian Komunikasi*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000), h. 83.

alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode observasi non partisipan yang maksudnya adalah mengadakan pengamatan terhadap obyek penelitian dalam melakukan aktifitasnya tanpa terlibat langsung dalam aktifitasnya.

b. Wawancara (*interview*)

Wawancara (*interview*) adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Interview adalah suatu penelitian bertujuan mengumpulkan keterangan tentang bagaimana Bappeda memproses perencanaan pembangunan dan pelaksanaan fungsi Bappeda dalam proses perencanaan pembangunan ditinjau dari *fiqh siyasah*.

Metode ini digunakan sebagai metode utama untuk mengumpulkan informasi yang dibutuhkan secara akurat. Pertimbangannya adalah semua proses perencanaan pembangunan yang telah dilaksanakan dan pelaksanaan fungsi Bappeda dalam proses perencanaan pembangunan yang belum terealisasi secara akurat yang diharapkan masyarakat. Terhadap jenis data seperti ini maka dengan wawancara lebih valid dan lebih mendalam. Peneliti menggunakan metode wawancara santai (tidak terstruktur) dengan beberapa orang yang berkapasitas dan patut untuk dimintai keterangan mengenai permasalahan yang peneliti ambil.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah “mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, terutama berupa arsip-arsip dan juga termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil atau hukum-hukum dan sebagainya, yang berhubungan dengan masalah penyelidikan”.³⁴ Metode dokumentasi dijadikan sebagai metode pelengkap. Data yang akan digali adalah data yang berkenaan dengan dokumen tertulis atau arsip kegiatan pelaksanaan fungsi Bappeda yang sudah dan akan dilaksanakan. Dalam kegiatan ini dokumentasi berperan sebagai alat kontrol data-data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi.

Studi dokumentasi sangat besar manfaatnya karena dapat menggambarkan latar belakang mengenai pokok masalah penelitian juga dapat dijadikan bahan pengecekan terhadap kesesuaian data Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data-data tertulis. Dokumen yang dimaksud yaitu berupa Tugas Pokok dan fungsi BAPPEDA, Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1980 Tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Nasional.

³⁴*Ibid*, h. 112.

6. Metode Pengolahan Data

Setelah peneliti memperoleh data yang cukup untuk penulisan skripsi ini, maka selanjutnya penulis melakukan pengolahan data dengan melakukan beberapa langkah sebagai berikut yaitu:

- a. Pemeriksaan data (*editing*), yaitu pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk atau terkumpul itu tidak logis dan meragukan.³⁵
- b. *Koding*, yaitu mengklasifikasikan jawaban-jawaban dari responden ke dalam kategori-kategori,³⁶ atau memberikan catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data atau urutan rumusan masalah.
- c. Rekontruksi data (*reconstructing*), yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan dan logis. Sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.
- d. Penyusunan atau Sistematis data (*constructing atau systematizing*), yaitu mengelompokkan secara sistematis data yang sudah diedit dan diberi tanda menurut klasifikasi data dan urutan masalah.³⁷

7. Metode Analisa Data

Penulis menggunakan metode kualitatif yaitu “suatu prosedur penelitian yang menghabiskan data tertulis maupun lisan dari orang-orang.”³⁸ Dengan kata

³⁵Susiadi AS, *Metodelogi Penelitian*, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015), h. 115.

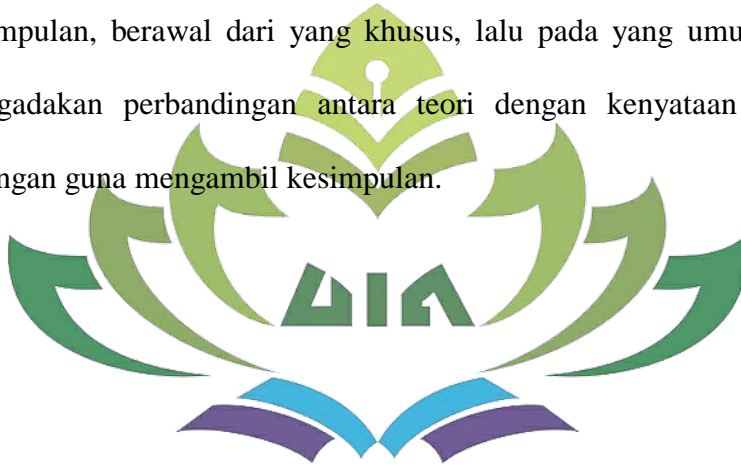
³⁶ *Ibid*, h.115.

³⁷Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004)Cet ke-1, h. 9.

³⁸Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h. 104.

lain metode kualitatif artinya menguraikan data sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.”³⁹metode ini melalui tahapan pengamatan, wawancara, atau penelaahan dokumen⁴⁰.

Selain itu penulis menggunakan metode Deduktif, yaitu berangkat dari fakta-fakta yang umum dan ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.⁴¹Pendekatan deduktif ini juga dapat digunakan dalam mengolah hasil penelitian lapangan.Penulis juga menggunakan metode induktif yaitu menarik kesimpulan, berawal dari yang khusus, lalu pada yang umum,⁴² lalu penulis mengadakan perbandingan antara teori dengan kenyataan yang terjadi di lapangan guna mengambil kesimpulan.



³⁹Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004)Cet ke-1, h. 127.

⁴¹ Amri Darwis, *Metode Penelitian Pendidikan Islam: Pengembangan Ilmu Berparadigma Islami* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014) Cet ke-1, h. 30.

⁴²*Ibid*

BAB II

FIQH SIYASAH TENTANG PELAKSANAAN FUNGSI BAPPEDA DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN

A. Pengertian *Fiqh Siyasah*

Fiqh siyasah merupakan *tarkib idhafi* atau kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata, yakni *fiqh* dan *siyasah*. Secara etimologi, *fiqh* merupakan bentuk *masdhar* (gerund) dari *tashrifan* kata *faqih* *yafqahu-fiqhan* yang berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan atau tindakan tertentu. Sedangkan secara terminologi, *fiqh* lebih populer didefinisikan sebagai ilmu tentang hukum-hukum *syara'* yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalilnya yang rinci.⁴³

Sementara mengenai asal kata *siyasah* terdapat tiga pendapat :

1. Sebagaimana dianut al-Maqrizy menyatakan, *siyasah* berasal dari bahasa mongol, yakni dari kata *yasah* yang mendapat imbuhan huruf sin berbaris kasrah di awalnya sehingga di baca *siyasah*. Pendapat tersebut di dasarkan kepada sebuah kitab undang-undang milik Jengish khan yang berjudul *ilyasa* yang berisi panduan pengelolaan Negara dengan berbagai bentuk hukuman berat bagi pelaku tindak pidana tertentu.
2. Sedangkan Ibn Taghri Birdi, *siyasah* berasal dari campuran tiga bahasa, yakni bahasa Persia, turki dan mongol.

⁴³ Ibnu Syarif, Mular dan Zada, Khamami, *Fiqh siyasah; Doktrin dan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Erlangga, 2008), h. 31.

3. Dan Ibnu Manzhur menyatakan, *siyasah* berasal dari bahasa arab, yakni bentuk *mashdar* dari *tashrifan* kata *sasa-yasusu-siyasatun*, yang semula berarti mengatur, memelihara, atau melatih binatang, khususnya kuda. Sejalan dengan makna yang disebut terakhir ini, seseorang yang profesinya sebagai pemelihara kuda.⁴⁴

Sedangkan secara terminologis banyak definisi *siyasah* yang di kemukakan oleh para yuridis Islam. Menurut Abu al-Wafa Ibn ‘Aqil, *siyasah* adalah suatu tindakan yang dapat mengantarkan rakyat lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kerusakan, kendati pun Rasulullah tidak menetapkannya dan Allah juga tidak menurunkan wahyu untuk mengaturnya.⁴⁵

Objek kajian *fiqh siyasah* meliputi aspek pengaturan hubungan antara warga negara dengan warga negara, hubungan antar warga negara dengan lembaga negara, dan hubungan antara lembaga negara dengan lembaga negara, baik hubungan yang bersifat intern suatu negara maupun hubungan yang bersifat ekstern antar negara, dalam berbagai bidang kehidupan. Dari pemahaman seperti itu, tampak bahwa kajian *siyasah* memusatkan perhatian pada aspek pengaturan.

Penekanan demikian terlihat dari penjelasan T.M. Hasbi al Shiddieqy yang menyatakan objek kajian *siyasah* adalah pekerjaan-pekerjaan mukallaf dan urusan-urusan mereka dari jurusan penadbirannya, dengan mengingat persesuaian penadbiran itu dengan jiwa syari’ah, yang kita tidak peroleh dalilnya yang khusus

⁴⁴Djazuli, *Fiqh Siyasah* (Damascus: Dar al-Qalam, 2007), h. 45.

⁴⁵*Ibid*, h. 109.

dan tidak berlawanan dengan sesuatu nash dari nash-nash yang merupakan syariah ‘amah yang tetap. Hal yang sama ditemukan pula pada pernyataan Abul Wahhab Khallaf bahwa objek pembahasan ilmu *siyasah* adalah pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaiannya dengan pokok-pokok agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.⁴⁶

Secara garis besar maka objeknya menjadi, *pertama*, peraturan dan perundang-undangan, *kedua*, pengorganisasian dan pengaturan kemaslahatan, dan *ketiga*, hubungan antar penguasa dan rakyat serta hak dan kewajiban masing-masing dalam mencapai tujuan negara.

Dari dua kata berbahasa Arab *fiqh* dan *siyasah*. Agar diperoleh pemahaman yang pas apa yang dimaksud dengan *Fiqh siyasah*. Dari uraian tentang pengertian istilah *fiqh* dan *siyasah* dari segi etimologis dan terminologis dapat disimpulkan bahwa pengertian *Fiqh siyasah* atau *Fiqh Syar’iyah* ialah “ilmu yang mempelajari hal-hal dan seluk-beluk pengatur urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat”.

B. Ruang Lingkup *Fiqh Siyasah*

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan ruang lingkup kajian *fiqh siyasah*. Diantaranya ada yang menetapkan lima bidang. Namun ada pula yang

⁴⁶Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), h. 30.

menetapkan kepada empat atau tiga bidang pembahasan. Bahkan ada sebagian ulama yang membagi ruang lingkup kajian *fiqh siyasah* menjadi delapan bidang.

Menurut al mawardi, ruang lingkup kajian *fiqh siyasah* mencakup:

1. Kebijaksanaan pemerintah tentang peraturan perundang-undangan (*Siyasah Dusturiyah*).
2. Ekonomi dan militer (*Siyasah Maliyah*)
3. Peradilan (*Siyasah Sadha'iyah*)
4. Hukum perang (*Siyasah Harbiah*).
5. Administrasi negara (*Siyasah Idariyah*).

Sedangkan ibn taimiyah meringkasnya menjadi empat bidang kajian yaitu:

1. Peradilan.
2. Administrasi negara.
3. Moneter
4. Serta hubungan internasional.

Sementara Abdul Wahhab Khallaf lebih mempersempitnya menjadi tiga bidang kajian saja yaitu:

1. Peradilan.
2. Hubungan internasional.
3. Dan keuangan Negara.

Berbeda dengan tiga pemikiran di atas, T.M. Hasbi malah membagi ruang lingkup *fiqh siyasah* menjadi delapan bidang yaitu:

1. Politik pembuatan perundang-undangan.

2. Politik hukum.
3. Politik peradilan.
4. Politik moneter/ekonomi.
5. Politik administrasi.
6. Politik hubungan internasional.
7. Politik pelaksanaan perundang-undangan.
8. Politik peperangan.⁴⁷

Berdasarkan perbedaan pendapat di atas, pembagian *fiqh siyasah* dapat di sederhanakan menjadi tiga bagian pokok yaitu :

1. Politik perundang-undangan (*al-Siyasah al-Dusturiyah*). Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum (*tasyri'iyah*) oleh lembaga legislatif, peradilan (*qadha'iyah*) oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan (*idariyah*) oleh birokrasi atau eksekutif.
2. Politik luar negeri (*al-Siyasah al-Kharijiah*). Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga muslim dengan warga negara non-muslim (*al-Siyasah al-Duali al-'Am*) atau disebut juga dengan hubungan internasional.
3. Politik keuangan dan moneter (*al-Siyasah al-Maliyah*). Permasalahan yang termasuk dalam siyasah maliyah ini adalah negara, perdagangan internasional, kepentingan/hak-hak publik, pajak dan perbankan.⁴⁸

⁴⁷ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah; Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2014), Cet Ke-1. h. 14.

⁴⁸ *Ibid*, h. 15.

C. Kedudukan *Fiqh Siyasah* dalam Sistematika Hukum Islam

Sebelum membahas kedudukan *fiqh siyasah* dalam sistematika hukum Islam, terlebih dahulu perlu dipaparkan pembagian hukum Islam (*fiqh*) secara sistematis, dari paparan ini diharapkan akan dapat diketahui kedudukan dan urgensi *fiqh siyasah* dalam sistematika hukum islam itu.

Secara global hukum Islam dapat dibagi dalam dua bagian pokok, yaitu:

1. *Fiqh 'Ibadah* (Hukum Ibadat): hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya. Bagian dari *Fiqh 'Ibadah* adalah shalat, puasa, zakat dan haji.
2. *Fiqh Mu'amalat* (Hukum Muamalah): hukum yang mengatur hubungan antara sesama manusia dalam masalah-masalah keduniaan secara umum. Bagian dari ini adalah secara khusus berkaitan dengan persoalan-persoalan ekonomi seperti jual beli, perjanjian, dan utang piutang. *Jinayah* (pidana) dan hukum perkawinan (*munakahat*).⁴⁹

T.M Hasbi ash-Shiddieqy (1904-1975) membagi hukum Islam secara sistematis menjadi enam bagian utama, yaitu: *Pertama*, yang berkaitan dengan masalah ibadah kepada Allah seperti shalat, zakat, dan haji. *Kedua*, yang berkaitan dengan keluarga, seperti nikah, talak, dan rujuk. *Ketiga*, yang berkaitan dengan perbuatan manusia dalam hubungan sesama mereka dalam bidang kebendaan seperti jual beli dan sewa-menyewa. *Keempat*, yang berkaitan dengan perang-

⁴⁹*Ibid*, h. 9.

damai dan jihad (*siyar*). *Kelima*, yang berkaitan dengan hukum acara di pengadilan (*munafa'ah*). *Keenam*, yang berkaitan dengan akhlak (*adab*).⁵⁰

Dari sistematika ini dapat ditarik benang merah bahwa *fiqh siyasah* memegang peranan dan kedudukan penting dalam penerapan dan aktualisasi hukum Islam bisa berlaku secara efektif dalam masyarakat Islam. Tanpa keberadaan Negara dan pemerintahan, ketentuan-ketentuan hukum Islam akan sulit sekali terjamin keberlakuannya, barangkali untuk masalah ibadah tidak terlalu banyak campur tangan siyasah, tetapi untuk urusan kemasyarakatan yang kompleks, umat Islam membutuhkan siyasah.

Dalam perkembangan masyarakat yang semakin bergerak cepat, permasalahan yang timbul pun semakin kompleks dan menuntut pemecahan. Apalagi hukum Islam (pemikiran *fiqh* para ulama klasik) tidak sampai detail mengatur berbagai persoalan kehidupan umat Islam. Di antara problem aktual yang berkembang saat ini umpamanya adalah tentang hak asasi manusia, demokrasi, hubungan timbal balik antara karyawan dan perusahaan, perpajakan dan perbankan.

Kalau permasalahan tersebut dihadapi dan dijawab hanya secara parsial dan *ad hoc*, kemungkinan besar hukum Islam akan *out of date* dan tidak responsif terhadap perkembangan. Karena itu, Negara memegang peran penting dalam mengatasi hal ini. Permasalahan yang berkembang dapat diantisipasi dan dijawab dengan menghimpun berbagai komponen keilmuan untuk menentukan kebijakan-

⁵⁰Ibid, h. 10.

kebijakan yang dapat diterima dan memberi maslahat untuk masyarakat. Di sinilah peran penting *fiqh siyasah*.

Dengan demikian, bisa disimpulkan bahwa *fiqh siyasah* mempunyai kedudukan penting dan posisi yang strategis dalam masyarakat Islam. Dalam memikirkan, merumuskan, dan menetapkan kebijakan-kebijakan politik praktis yang berguna bagi kemaslahatan masyarakat muslim khususnya, dan warga lain umumnya, pemerintah jelas memerlukan *siyasah syar'iyah*. Tanpa kebijakan politik pemerintah, sangat boleh jadi umat Islam akan sulit mengembangkan potensi yang mereka miliki. *Fiqh siyasah* juga dapat menjamin umat Islam dari hal-hal yang bisa merugikan dirinya. *Fiqh siyasah* dapat diibaratkan sebagai akar sebuah pohon yang menopang batang, ranting, dahan, dan daun, sehingga menghasilkan buah yang dapat dinikmati umat Islam dan manusia umumnya.⁵¹

D. Perencanaan Pembangunan dalam *Fiqh Siyasah*

Terkait dengan arti dan kedudukan perencanaan dalam sebuah pembangunan dalam kajian *fiqh siyasah*, sebelum merencanakan sebuah pembangunan yang mana hal ini merupakan sesuatu yang universal kita juga harus mempunyai sebuah perencanaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehubungan dengan hal ini sebagaimana dalam firman Allah SWT : الله

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ

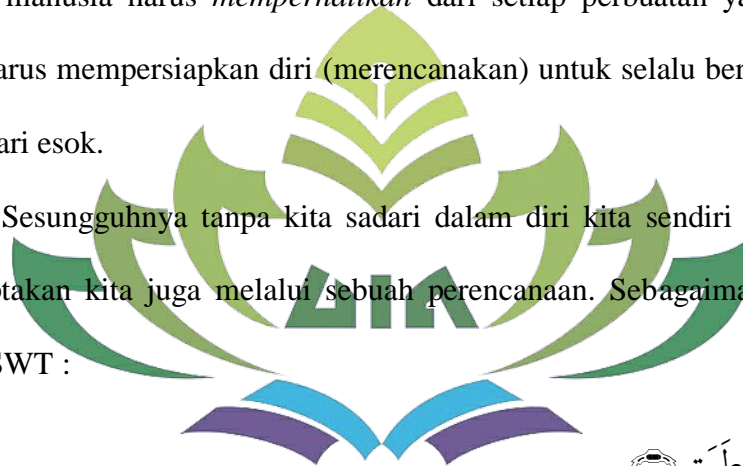
إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٦٠﴾

⁵¹ *Ibid*, h. 12.

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan*”. (QS Al-Hasyr: 18)⁵²

Dari penjelasan ayat di atas, bahwa manusia diperintahkan untuk memperbaiki dirinya, untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, dimana proses kehidupan manusia tidak boleh sama dengan kehidupan yang sebelumnya (kemarin). Di samping itu *kata perhatikanlah* mengandung makna bahwa manusia harus *memperhatikan* dari setiap perbuatan yang dia kerjakan, serta harus mempersiapkan diri (*merencanakan*) untuk selalu berbuat yang terbaik demi hari esok.

Sesungguhnya tanpa kita sadari dalam diri kita sendiri Allah SWT telah menciptakan kita juga melalui sebuah perencanaan. Sebagaimana dalam firman Allah SWT :



لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ ﴿١٩﴾

Artinya: “*Sesungguhnya kamu melalui tingkat demi tingkat (dalam kehidupan)*.” (QS (Al-Insyiqaq: 19)⁵³

Yang dimaksud dengan tingkat demi tingkat ialah dari setetes air mani sampai dilahirkan, kemudian melalui masa kanak-kanak, remaja dan sampai dewasa. Dari hidup menjadi mati kemudian dibangkitkan kembali. Dan Allah-lah maha sempurna dalam perencanaan. Firman Allah SWT :

⁵²Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2008), h. 548.

⁵³*Ibid.* h. 589.

وَأَكِيدُ كَيْدًا ﴿١٦﴾

Artinya: “Dan akupun membuat rencana (pula) dengan sebenar-benarnya”. (QS Ath-thaariq: 16)⁵⁴

Dari firman Allah SWT di atas jelas Allah adalah maha sempurna dalam segala hal. Jadi Allah yang maha sempurna membuat perencanaan apalagi kita sebagai makhluk ciptaan yang lemah maka perlu sekali untuk merencanakan perbuatan kita, karena nasib kita tergantung pada diri kita sendiri. Sebagaimana firman Allah SWT:



Artinya: Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, Maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia.

Bagi tiap-tiap manusia ada beberapa malaikat yang tetap menjaganya secara bergiliran dan ada pula beberapa malaikat yang mencatat amalan-amalannya. dan yang dikehendaki dalam ayat Ini ialah malaikat yang menjaga secara bergiliran itu, disebut malaikat Hafazhah.

Tuhan tidak akan merubah keadaan mereka, selama mereka tidak merubah sebab-sebab kemunduran mereka. (QS AR-Ra'd: 11)⁵⁵

⁵⁴ Ibid, h. 591.

⁵⁵ Ibid. h. 250.

E. Pembangunan dalam *Fiqh Siyasah*

Konsep pembangunan dalam *fiqh siyasah* bersifat menyeluruh. Berbeda dengan konsep-konsep pembangunan lain yang lebih mengarah pada pengertian fisik dan materi, tujuan pembangunan dalam *fiqh siyasah* lebih dari itu. Bagi *fiqh siyasah* pembangunan yang dilakukan oleh manusia seharusnya hanya mengejar satu tujuan utama, yaitu: kesejahteraan ummah. Oleh karenanya, konsep pembangunan dalam *fiqh siyasah* dapat dikatakan sebagai usaha pembangunan oleh seluruh lapisan masyarakat untuk mewujudkan adanya manusia seutuhnya.

Landasan ini yang perlu mendapat penekanan. Karena tanpa terwujudnya manusia seutuhnya tersebut, suatu proses pembangunan dalam pandangan *fiqh siyasah* tidak akan berarti apa-apa. Tujuan yang bersifat tunggal ini semakin nampak apabila dikaji landasan-landasan pemikiran filosofis dalam pendekatan *fiqh siyasah* terhadap pembangunan. Ada empat landasan yang mendasari pemikiran mengenai konsep pembangunan menurut *fiqh siyasah*, yaitu:

1. *Tauhid* (keesaan dan kedaulatan Allah SWT). Ajaran ini merupakan landasan dari aturan-aturan tentang hubungan Allah dengan manusia dan hubungan manusia dengan sesamanya.
2. *Rububyyah* (ketentuan-ketentuan Allah SWT tentang rizki, rahmat dan petunjuk-Nya untuk menyempurnakan segala pemberian-Nya itu). Ajaran ini merupakan ketentuan Allah SWT. mengenai alam semesta, pemanfaatan dan pengembangan sumber-sumber di dalamnya untuk kesejahteraan dan kelestarian kehidupan bersama.

3. *Khilafah* (fungsi manusia sebagai khalifah Allah dimuka bumi). Ajaran ini menetapkan kedudukan dan peranan manusia, baik sebagai individu maupun anggota masyarakat, sebagai pengemban jabatan khilafah itu. Disini kelebihan konsep pembangunan *fiqh siyasah* dari konsep-konsep lainnya, dengan mendudukan peranan manusia pada tempat yang tinggi dan terhormat, tetapi sangat bertanggung jawab.
4. *Tazkiyah* (penyucian dan pengembangan). Tugas yang dibebankan kepundak para rasul Allah adalah melakukan tazkiyah (penyucian) manusia dalam segala hubungan dan pergaulannya dengan Allah, dengan manusia sesamanya, dengan lingkungan alamnya, dan dengan masyarakat serta bangsa dan negaranya.

Dari keempat landasan ini jelas bahwa tujuan utama pembangunan menurut *fiqh siyasah* mengarah pada kemakmuran dan kebahagiaan. Bukan saja di dunia, namun juga diakhirat kelak. Tujuan ini menjadi penting, ditunjukkan dengan adanya landasan khilafah disatu pihak, tanpa mengabaikan landasan tazkiyah dipihak yang lain. Keseimbangan inilah tampaknya yang ingin dikejar dan diwujudkan dalam konsep pembangunan yang bernafaskan *fiqh siyasah*.

Pembangunan yang bernafaskan *fiqh siyasah*; tidak lepas dari suatu upaya untuk menerapkan prinsip-prinsip perekonomian Islam. Prinsip-prinsip ekonomi Islam menekankan kehendak untuk mengurangi konsumsi pribadi, mengurangi simpanan dan tabungan pribadi, serta menambah pengeluaran dijalan Allah. Dengan demikian, sebenarnya sendi-sendi ekonomi Islam adalah tauhid dan persaudaraan.

Konsep tauhid memegang peranan penting karena esensi dari segala sesuatu, termasuk aktivitas pembangunan adalah didasarkan pada ketundukan pada aturan Allah Swt. Pembangunan harus dilakukan dan diarahkan kepada upaya untuk melaksanakan segala ketentuan-Nya. Adapun pelaku pembangunan adalah manusia. Manusia sebagai hamba Allah, juga sekaligus *khalifatullah fil ardh* (wakil Allah di muka bumi) bertugas untuk memakmurkan bumi. Kedua tugas ini akan berjalan baik dan sukses sangat tergantung pada jalan yang dipilihnya. Pilihan atas jalan tersebut mempengaruhi arah dari pembangunan. Allah telah memberikan dua potensi pada diri manusia dalam menentukan arah kehidupan, yaitu potensi kebaikan (*al-taqwa*) dan potensi keburukan (*al-fujur*).

Adapun tazkiyah merupakan upaya untuk mentransformasikan kehidupan ke arah yang lebih baik dan berkah. Kerangka tazkiyah didasari pada tiga prinsip utama yaitu keadilan, keseimbangan dan ketundukan yang sempurna kepada Allah SWT. Konsep tazkiyah mendorong bahwa fokus pembangunan tidak hanya diarahkan pada hal-hal yang bersifat fisik material semata, melainkan juga dikaitkan dengan aspek moral spiritual. Ukuran-ukuran keberhasilan pembangunan tidak hanya didasarkan pada ukuran-ukuran material, namun juga ditentukan oleh kualitas moral pelaku pembangunan.

Kualitas SDM pelaku pembangunan pun sangat menentukan tingkat keberhasilan pembangunan suatu Negara. Karena itu pembangunan SDM sangat diperlukan, apalagi esensi kemajuan suatu bangsa sangat ditentukan oleh kualitas SDM yang dimiliki oleh bangsa tersebut. Di sinilah letak fungsi dan peran negara,

di mana pemerintah sebagai “manajer dan pelayan” pembangunan harus mampu memetakan semua potensi SDM dan sumber daya alam (SDA) untuk dikelola dengan maksimal, guna menciptakan kesejahteraan dan kebahagiaan bagi masyarakat dalam rentang waktu dunia dan akhirat. Artinya *time line* (skala waktu) pembangunan adalah menciptakan kesejahteraan masyarakat di dunia tanpa mengorbankan kehidupan akhirat pelaku pembangunan.

Jika memacu pembangunan ekonomi saja, maka akan tercerabutnya nilai-nilai keadilan dan kesejahteraan, akan lahir pelaku pembangunan yang korup, pembisnis yang kotor dan masyarakat yang materialistik. Semua sisi kehidupan dinilai dengan uang. Uang menjadi alat ukur kesejahteraan.

Kekeliruan-kekeliruan premis konvensional dalam teori pembangunan menjadi akar masalah timbulnya paradoks antara pertumbuhan dan distribusi ekonomi. Kehadiran ekonomi Islam meminimalisasi paradoks yang diakibatkan konvensional dengan mengubah paradigma konflik antara pertumbuhan dengan distribusi, melalui penciptaan berbagai instrument dan mekanisme yang bisa menjamin tumbuhnya ekonomi di satu sisi, dan terciptanya distribusi di sisi lain. Konsepsi ini tercermin dalam kesatuan arah pembangunan Islam melalui tiga sektor yaitu produktivitas sektor ril, keuangan syari’ah, dan kesejahteraan yang terefleksi pada zakat, infak, sedakah dan wakaf (Ziswaf).

F. Perencanaan

Dalam undang-undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2004, Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang

tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

Secara utuh perencanaan berasal dari kata rencana, yang berarti rancangan atau rangka sesuatu yang akan dikerjakan. Dari pengertian sederhana tersebut dapat diuraikan beberapa komponen penting, yakni tujuan (apa yang ingin dicapai), kegiatan (tindakan untuk merealisasikan tujuan), dan waktu (kapan, bilamana kegiatan tersebut hendak dilakukan). Apapun yang direncanakan tentu saja merupakan tindakan-tindakan di masa depan (untuk masa depan). Dengan demikian, suatu perencanaan bisa dipahami sebagai respon (reaksi) terhadap masa depan.⁵⁶

Menurut Terry, perencanaan adalah upaya untuk memilih dan menghubungkan fakta-fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-asumsi mengenal masa yang akan datang dengan jalan mengambarkannya dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang di perhatikan untuk mencapai hasil yang diinginkan.⁵⁷

Defenisi perencanaan dapat diartikan hubungan antara apa yang ada sekarang (*what is*) dengan bagaimana seharusnya (*what should be*) yang bertalian dengan kebutuhan penentuan tujuan, prioritas program, dan alokasi sumber.⁵⁸

Menurut Hasibuan, rencana adalah sejumlah keputusan yang menjadi pedoman untuk mencapai suatu tujuan tertentu.⁵⁹ Kemudian menurut

⁵⁶Abe Alexander, *Perencanaan Daerah Partisipatif*, (Yogyakarta: Pustaka Jogja Mandiri, 2005), h. 27.

⁵⁷Riyadi, Deddy Supriyadi Bratakusumah, *Perencanaan Pembangunan Daerah (Strategi Menggali Potensi dalam Mewujudkan Otonomi Daerah)* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005), h. 3.

⁵⁸Uno Hamzah B, *Perencanaan Pembelajaran*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), h. 1.

Tjokroamidjojo, perencanaan dalam arti seluas-luasnya merupakan suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Perencanaan adalah suatu cara bagaimana mencapai tujuan sebaik-baiknya dengan sumber-sumber yang ada supaya lebih efektif dan efisien.

Perencanaan dapat dilakukan dalam berbagai bidang, namun tidak semua rencana merupakan perencanaan pembangunan terkait dengan kebijaksanaan pembangunan maka pemerintah berperan sebagai pendorong pembangunan, ini terkait dengan definisi perencanaan yang merupakan upaya institusi publik untuk membuat arah kebijakan pembangunan yang harus dilakukan disebuah wilayah baik di negara maupun daerah dengan didasarkan keunggulan dan kelemahan yang dimiliki oleh wilayah tersebut.

Dari beberapa pemaparan pendapat diatas dapat diuraikan bahwa perencanaan yaitu serangkaian keputusan dalam melaksanakan sebuah kegiatan yang menjadi suatu pedoman untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan sumber daya tersedia. Jadi sebuah perencanaan tergantung perencanaan apa yang dibuat, apakah jangka panjang, menengah ataupun hanya jangka pendek.

⁵⁹Syafiie Inu Kencana, *Menejemen Pemerintahan*, (Jakarta: PT PERCA, 2007), h. 49.

a. Fungsi Perencanaan

Menurut kamus bahasa Indonesia kata fungsi yang mempunyai arti jabatan (pekerjaan) yang dilakukan, jika ketua tidak ada, wakil ketua melakukannya.

Jadi fungsi adalah kegiatan pokok yang dilakukan dalam suatu organisasi atau lembaga berdasarkan jabatan atau kedudukan. Berdasarkan uraian di atas, bahwa fungsi menandakan suatu jabatan dalam sebuah organisasi yang menggambarkan akan tugas dan fungsinya sebagai serangkaian kegiatan yang dijalankan dalam organisasi berdasarkan fungsinya masing-masing dan mengikuti satu tahapan-tahapan tertentu dalam pelaksanaannya.

Definisi diatas mengemukakan, bahwa fungsi organisasi merupakan kegiatan yang harus dilaksanakan dalam sebuah organisasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan berdasarkan tingkatan-tingkatan yang telah diberikan kepada yang menjalankan kegiatan fungsi itu sendiri. Fungsi tersebut merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pegawai yang pada hakikatnya bertujuan untuk melakukan kegiatan-kegiatan dengan pekerjaan yang dijabat seseorang.

Fungsi perencanaan itu merupakan sebagai usaha persiapan yang sistematis tentang berbagai kegiatan yang perlu dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan. Perencanaan ialah perumusan tujuan prosedur, metode dan jadwal pelaksanaannya, di dalamnya termasuk ramalan tentang kondisi dimasa akan datang dan perkiraan akibat dari perencanaan terhadap kondisi tersebut.

Rencana pembangunan hendaknya dapat pula menimbulkan solidaritas nasional dan solidaritas sosial, keterlibatan dalam memikul beban dan tanggung jawab.

Menurut Siagian, mengemukakan fungsi perencanaan dapat didefinisikan sebagai Pengambilan keputusan pada masa sekarang tentang hal-hal yang akan dilakukan dalam saat kurun waktu tertentu diwaktu dimasa yang akan datang.⁶⁰

Menurut Handoko, ada dua fungsi perencanaan :

1. Penetapan atau pemilihan tujuan-tujuan organisasi dan
2. Penentuan strategi, kebijaksanaan, proyek, program prosedur, metode, sistem anggaran dan standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan.⁶¹

Untuk merumuskan sebuah perencanaan pembangunan harus ditentukan langkah-langkah tertentu guna penetapan perencanaan yang baik, yaitu:

1. Identifikasi Masalah
2. Analisis Situasi
3. Merumuskan yang hendak dicapai
4. Menyusun garis besar semacam proposal
5. Membicarakan proposal yang telah disusun
6. Menetapkan komponen
7. Penentuan tanggungjawab masing-masing komponen
8. Menentukan outline

⁶⁰Sondang P Siagian, *Administrasi Pembangunan* (Jakarta: Gunung Agung, 2002), h. 36.

⁶¹Handoko T. Hani, *Manajemen*, (Yogyakarta: BAFE, 2003), Edisi II, h. 23.

9. Mengadakan kontak antar unit
10. Pengumpulan data terkait
11. Pengolahan data
12. Penyimpulan data
13. Pendiskusian rencana sesuai data
14. Penyusunan naskah pinal
15. Evaluasi naskah rencana
16. Persetujuan naskah rencana
17. Penjabaran untuk pelaksana.⁶²

Jadi dalam sebuah kegiatan yang ingin dilakukan, sebelumnya harus direncanakan terlebih dulu karena sebuah perencanaan akan menjadi sebuah patokan dalam melaksanakan kegiatan dalam pencapaian sebuah tujuan. Dengan adanya sebuah perencanaan sebuah kegiatan akan berjalan secara struktural yang akan mempermudah tercapainya tujuan sesuai dengan apa yang diinginkan.

Sedangkan menurut Siagian proses perencanaan dapat ditinjau dari ciri-ciri suatu rencana yang baik, yaitu:

1. Rencana harus mempermudah tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.
2. Rencana harus dibuat oleh orang-orang yang memahami tujuan organisasi.

⁶²Syafiie Inu Kencana, *Op. Cit.* h. 50.

3. Rencana harus dibuat oleh orang-orang yang sungguh-sungguh memahami teknik-teknik perencanaan.
4. Rencana harus disertai oleh suatu rincian yang diteliti.
5. Perencanaan tidak boleh terlepas sama sekali dari pemikiran pelaksanaan.
6. Rencana harus bersifat sederhana dan jelas.
7. Rencana harus luas.
8. Dalam perencanaan terdapat pengambilan resiko tidak ada seorang manusia yang persis tahu apa akan terjadi dimasa depan.
9. Rencana harus bersifat praktis.⁶³

Rencana harus merupakan *forecasting*, mengatur rencana akan dijalankan dimasa yang akan datang, maka rencana itu merupakan peramalan atas keadaan yang kemungkinan akan dihadapi. Jadi seandainya kemungkinan dalam perencanaan itu benar-benar terjadi, kita bisa mempertimbangkan bagaimana untuk mencari atau mempertimbangkan sebuah solusinya.

Untuk mencapai suatu rencana pembangunan yang komprehensif, maka terbagilah beberapa pokok sub usaha atau kegiatan perencanaan untuk dapat sampai kepada suatu rencana komprehensif yaitu:

1. Analisa keadaan saat ini
2. Penentuan; proyeksi, tujuan, strategi dan sasaran
3. Perumusan ; program dan proyek
4. Penjadwalan tindakan; analisis jaringan kerja

⁶³Sondang P Siagian, Op. Cit. h. 90-91.

5. Realitas saat ini
6. Citra masa depan
7. Tindakan yang diperlukan
8. Skenario bagi usaha pembangunan
9. Perumusan rencana
10. Implementasi terhadap rencana
11. Proses perencanaan
12. Proses pembangunan.

Jadi sebuah rencana itu sangat penting sekali dalam sebuah pembangunan karena merupakan sebuah keterampilan penting untuk suatu keberhasilan dan sesuai dengan waktu yang ditentukan.

Dalam sebuah perencanaan waktu mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap perencanaan, dimana terdapat tiga hal penting dalam penggunaan waktu :

1. Waktu sangat diperlukan untuk melaksanakan perencanaan efektif.
2. Waktu sering diperlukan untuk melaksanakan perencanaan tanpa informasi lengkap tentang variabel dan alternative, karena waktu diperlukan untuk mendapatkan data dan memperhitungkan semua kemungkinan.
3. Jumlah waktu yang akan dicakupkan dalam rencana harus di pertimbangkan.

Keberhasilan pencapaian tujuan perencanaan jangka pendek atau jangka panjang maupun jangka menengah membutuhkan kemampuan jenis-jenis lain dari perencanaan, selain harus memiliki tingkat pengalaman, pengetahuan, dan

institusi yang baik, perencanaan perumusan yang sistematis, maka segala upaya pencapaian tujuan yang dilaksanakan dapat menjadi kurang efisien. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.⁶⁴

b. Faktor Penghambat Dalam Perencanaan

Dalam perumusan perencanaan pembangunan, Menurut Todaro, bahwa kegagalan proses perencanaan diakibatkan oleh beberapa masalah khusus tertentu, yaitu :

1. Keterbatasan penyusunan rencana dan pelaksanaannya.
2. Data-data yang tidak memadai dan tidak handal.
3. Gejolak ekonomi eksternal dan internal yang tidak dapat diantisipasi sebelumnya.
4. Kelemahan kelembagaan.
5. Kurangnya kemauan politik.⁶⁵

Sedangkan Menurut Riyadi dan Deddy, Beberapa hal yang sering menjadi kendala dalam proses perencanaan pembangunan daerah secara umum dapat dibagi menjadi 3 (tiga) macam yaitu :

⁶⁴Undang-Undang RI No. 25 Tahun 2004, *Tentang Sistem Perencanaan pembangunan Nasional*. Pasal 1.

⁶⁵Michael P Todaro, *Pembangunan Ekonomi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), h. 67.

1. Keadaan politis merupakan kendala yang disebabkan oleh adanya kepentingan-kepentingan yang mendompleng pada substansi perencanaan pembangunan.
2. Kondisi Sosio Ekonomi, biasanya mencerminkan kemampuan finansial daerah. karena kemampuan finansial memiliki peran penting untuk dapat merumuskan perencanaan yang baik.
3. Budaya atau Kultur yang dianut oleh masyarakat. Apabila kultur ini tidak diberdayakan dan diarahkan kearah yang positif secara optimal akan sangat mempengaruhi hasil-hasil perencanaan, bahkan bisa sampai tahap implementasinya.⁶⁶

G. Perencanaan Pembangunan Daerah

Perencanaan Pembangunan merupakan suatu tahapan awal dalam proses pembangunan. Sebagai tahapan awal, perencanaan pembangunan akan menjadi bahan atau pedoman dasar bagi pelaksanaan kegiatan pembangunan. Perencanaan Pembangunan daerah dapat dilihat berdasarkan unsur-unsur yang membentuknya, sebagaimana diketahui perencanaan pembangunan suatu sistem yang dibentuk dari unsur-unsur perencanaan, pembangunan, dan daerah, dengan melihat secara divergensi dari setiap unsur tersebut, kemudian diambil sebuah uraian secara konvergensi, akan membentuk suatu pengertian yang utuh.

Menurut Riyadi dan Deddy, Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan yang melibatkan berbagai unsur di

⁶⁶Riyadi, Deddy Supriyadi Bratakusumah, *Op. Cit.* h. 349.

dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber-sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah atau daerah dalam jangka waktu tertentu.⁶⁷

Menurut Bintaro Tjokroamidojo, mengatakan bahwa unsur-unsur pokok dalam perencanaan pembangunan sebagai berikut :

1. Kebijakan dasar atau strategi dasar perencanaan pembangunan yang sering pula disebut tujuan, arah dan prioritas pembangunan, pada unsur ini perlu ditetapkan tujuan-tujuan rencana.
2. Adanya kerangka rencana yang menunjukkan hubungan variabel-variabel pembangunan dan implikasinya.
3. Perkiraan sumber-sumber pembangunan terutama pembiayaan.
4. Adanya kebijaksanaan yang konsisten dan serasi, seperti kebijakan fiskal, moneter, anggaran, harga, sektirial dan pembangunan daerah.
5. Adanya program investasi yang dilakukan secara sektoral, seperti pertanian, industri, pendidikan, kesehatan dan lain-lain.
6. Adanya administrasi pembangunan yang mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.⁶⁸

Jadi dari beberapa unsur pokok perencanaan pembangunan diatas memang harus benar-benar diperhatikan dalam sebuah perencanaan pembangunan kerana hal tersebut merupakan dasar dari perencanaan pembangunan maka sebelum

⁶⁷Riyadi, Deddy Supriyadi Bratakusumah, *Op. Cit.* h. 7.

⁶⁸Bintaro Tjokroamidojo, *Perencanaan Pembangunan* (Jakarta: PT. Gunung Agung, 1996) Cet ke-9, h. 15.

merumuskan perencanaan pembangunan unsur-unsur tersebut harus diperhatikan terlebih dahulu.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan kegiatan yang tidak mudah karena akan berhadapan dengan berbagai permasalahan yang sangat kompleks dan kompreherensif meliputi berbagai aspek sosial masyarakat dari suatu keadaan yang ada dalam wilayah terkait. Maka untuk menjaga pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan perencanaan yang telah ditentukan sebelumnya, sehingga efisiensi dan efektifitas dapat dicapai sangat dibutuhkan sekali pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan daerah.

Monitoring dan evaluasi merupakan fungsi manajemen yang saling terkait. Monitoring dalam prakteknya diidentikkan dengan pengawasan, pengendalian, atau pemantauan terhadap aktivitas atau kegiatan yang sedang berjalan, sedangkan evaluasi sering diartikan sebagai penilaian terhadap suatu hasil aktivitas yang dilakukan setelah kegiatan berjalan.

Menurut Siagian dalam Riyadi, Pengawasan ialah proses pengamatan dari seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua kegiatan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Sedangkan evaluasi didefinisikan sebagai proses pengukuran dan perbandingan dari hasil-hasil yang seharusnya dicapai, dan tujuan pengawasan implementasi perencanaan pembangunan daerah dilakukan untuk :

1. Mengetahui sejauh mana pelaksanaan perencanaan dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan.

2. Mengetahui apakah unit-unit melaksanakan kegiatan sesuai dengan fungsi dan perannya masing-masing.
3. Mengetahui apakah ada koordinasi yang dilakukan oleh setiap unit atau instansi atau para pelaksana proyek dengan pihak-pihak terkait.
4. Mencegah dan mengendalikan penyimpangan-penyimpangan sehingga dapat dihindari.⁶⁹

1. Tujuan dan Fungsi Perencanaan Pembangunan

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, dalam rangka mendorong proses pembangunan secara terpadu dan efisien, pada dasarnya perencanaan pembangunan nasional di Indonesia mempunyai 5 tujuan dan fungsi pokok, Tujuan dan Fungsi Pokok tersebut sebagai berikut:

- a. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan
- b. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar Daerah
- c. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.
- d. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan Menjamin Tercapainya Penggunaan Sumberdaya Secara Efisien, Efektif dan Adil.⁷⁰

2. Jenis Perencanaan Pembangunan

Perencanaan pembangunan mempunyai berbagai jenis, tergantung dari sifatnya masing-masing. Menurut jangka waktunya, perencanaan pembangunan

⁶⁹*Ibid.* h. 263.

⁷⁰Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 2 ayat (4)

dapat diklasifikasikan atas tiga jenis yaitu : Perencanaan Jangka Panjang, Perencanaan Jangka Menengah, Perencanaan Jangka Pendek.

Pengertian dari masing-masing jenis perencanaan Pembangunan tersebut adalah sebagai berikut :

a. Perencanaan jangka Panjang

Perencanaan Jangka Panjang dimulai dengan pengumpulan bahan-bahan evaluasi pembangunan pada periode sebelumnya baik yang dilakukan oleh lembaga perencanaan, lembaga penyelenggaraan Negara, maupun masyarakat. Rencana pembangunan jangka panjang yang disusun oleh pemerintah daerah, disebut rencana pembangunan jangka panjang daerah, yang disingkat menjadi RPJP Daerah. RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah periode 20 tahun yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang mengacu pada rencana pembangunan jangka panjang nasional. Penyusunan RPJP Daerah dilakukan melalui urutan kegiatan:

1. Penyiapan rancangan awal rencana pembangunan
2. Musyawarah perencanaan pembangunan
3. Penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan

Bappeda sebagai badan perencanaan pembangunan daerah bertugas menyiapkan rancangan awal RPJP daerah. Rancangan awal RPJP yang disusun Bappeda tersebut akan digunakan sebagai bahan pembahasan dalam musyawarah perencanaan pembangunan. Musyawarah

perencanaan pembangunan (musrenbang), diselenggarakan Bappeda yang diikuti oleh unsur-unsur penyelenggaraan Negara dengan mengikut sertakan masyarakat (antara lain LSM, asosiasi profesi, pemuka agama, pemuka adat, perguruan tinggi serta kalangan dunia usaha), dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat. Berdasarkan hasil musyawarah tersebut Bappeda menyusun rancangan akhir RPJP daerah. RPJP Daerah ditetapkan dengan perda.⁷¹

b. Perencanaan Jangka Menengah

Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang disusun oleh pemerintah daerah, disebut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang disingkat menjadi RPJM Daerah. Dalam pasal 5 (2) Undang-undang RI Nomor 25 tahun 2004 menyatakan bahwa: RPJM daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang penyusunannya perpedoman pada RPJP daerah, dan memperhatikan RPJM nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategis pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program satuan kerja perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Penyusunan RPJM daerah dilakukan melalui urutan kegiatan:

1. Penyiapan rancangan awal rencana pembangunan

⁷¹ Nurman, *Strategi Pembangunan Daerah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015) Cet ke-1, h. 190.

2. Penyiapan rancangan rencana kerja
3. Musyawarah perencanaan pembangunan
4. Penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan

Rancangan RPJM dibahas di musrenbang untuk mendapatkan aspirasi dari para pemangku kepentingan yang hasilnya digunakan untuk menyempurnakan rancangan awal RPJM menjadi rancangan akhir RPJM. Rancangan awal RPJM disusun oleh kepala Bappeda yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah ke dalam strategis pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas kepala daerah, dan arah kebijakan keuangan daerah.

Dengan berpedoman pada rancangan awal RPJM daerah yang disiapkan oleh kepala bappeda, satuan kerja perangkat daerah, menyiapkan rancangan rencana strategis satuan kerja perangkat daerah (Renstra-SKPD), sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang memuat visi, misi, tujuan, strategis, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan. Rancangan Renstra-SKPD digunakan oleh Kepala Bappeda untuk menyusun rancangan RPJM daerah yang akan digunakan sebagai bahan penyelenggaraan musrenbang jangka menengah.

Musrenbang jangka menengah daerah dalam rangka menyusun RPJM daerah dilaksanakan paling lambat dua bulan setelah bupati dilantik dan diikuti oleh unsur-unsur penyelenggara Negara dan mengikutsertakan masyarakat. Bappeda menyusun rancangan akhir RPJM daerah berdasarkan

hasil musrenbang jangka menengah daerah. RPJM daerah ditetapkan dengan peraturan kepala daerah paling lambat tiga bulan setelah bupati dilantik. Setelah ditetapkannya RPJM daerah, satuan kerja perangkat daerah serta menyesuaikan Renstranya dengan RPJM daerah yang telah disahkan dan ditetapkan dengan peraturan pimpinan satuan kerja perangkat daerah.⁷²

c. Perencanaan Jangka Pendek

Perencanaan jangka pendek biasanya mencakup 1 tahun, sehingga sering kali dinamakan sebagai rencana tahunan. Rencana ini pada dasarnya adalah merupakan jabaran dari rencana jangka menengah. Di samping itu, perencanaan tahunan ini bersifat sangat operasional karena di dalamnya termasuk program dan kegiatan, lengkap dengan pendanaannya. Bahkan dalam rencana tahunan ini termasuk juga Indikator dan target kinerja untuk masing-masing program dan kegiatan. Karena itu, rencana tahunan ini selanjutnya dijadikan dasar utama dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja baik pada tingkat Nasional (RAPBN) maupun pada tingkat Daerah (RAPBD) rencana tahunan yang mencakup kesemua sektor dinamakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sedangkan khusus untuk suatu sektor atau bidang dinamakan Rencana Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD).⁷³

⁷² Ibid, h. 191

⁷³ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 20.

3. Tahapan Perencanaan Pembangunan

a. Tahap Penyusunan Rencana

Tahap awal kegiatan perencanaan adalah menyusun naskah atau rancangan rencana pembangunan yang secara formal merupakan tanggung jawab badan perencana, baik BAPPENAS untuk tingkat Nasional dan BAPPEDA untuk tingkat Daerah. Bila penyusunan rencana dilakukan dengan menggunakan pendekatan Perencanaan Partisipatif, maka sebelum naskah rencana disusun, terlebih dahulu perlu dilakukan penjangkaran aspirasi dan keinginan masyarakat tentang visi misi serta arah pembangunan. Berdasarkan hasil penjangkaran aspirasi masyarakat tersebut, maka tim penyusunan rencana sudah dapat mulai menyusun rencana awal (rancangan) dokumen perencanaan pembangunan yang dibutuhkan. Kemudian rancangan tersebut dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) untuk menerima tanggapan baik dari pihak yang peduli dan berkepentingan dengan pembangunan seperti tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai, dan para tokoh Lembaga Sosial Masyarakat setempat.

b. Tahap Penetapan Rencana

Sesuai ketentuan berlaku, RPJP perlu mendapat pengesahan dari DPRD setempat, sedangkan RPJM dan RKPD cukup mendapat pengesahan dari kepala daerah. Pada tahap kedua ini kegiatan utama badan perencanaan adalah melakukan proses untuk mendapatkan pengesahan tersebut.

c. Tahap pengendalian Pelaksanaan rencana

Setelah rencana pembangunan tersebut ditetapkan oleh pihak yang berwenang, maka dimulai proses pelaksanaan rencana oleh pihak eksekutif melalui SKPD terkait. Sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku, perencana masih tetap mempunyai tanggung jawab dalam melakukan pengendalian pelaksanaan rencana bersama SKPD bersangkutan.

d. Tahap Evaluasi Keberhasilan Pelaksanaan Rencana

Setelah pelaksanaan kegiatan pembangunan selesai, badan perencana masih mempunyai tanggungjawab terakhir, yaitu melakukan evaluasi terhadap kinerja dari kegiatan pembangunan tersebut. Sasaran utama kegiatan evaluasi ini adalah untuk mengetahui apakah kegiatan dan objek pembangunan yang telah selesai dilaksanakan tersebut dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang *Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan pemerintah daerah*, evaluasi harus dilakukan dengan menggunakan metode evaluasi kinerja yang paling kurang didasarkan atas 3 unsur utama yaitu: unsur masukan (*input*) terutama dana, keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*). Disamping itu, evaluasi ini juga mencakup faktor-faktor utama yang menyebabkan berhasilnya atau kendala yang menyebabkan kurangnya manfaat yang dapat dihasilkan oleh objek dan kegiatan pembangunan tersebut.⁷⁴

⁷⁴*Ibid*, Pasal 8.

H. Pembangunan

Pengertian pembangunan memiliki beragam definisi. Istilah pembangunan dapat saja diartikan berbeda oleh berbagai ahli. Namun secara umum pembangunan merupakan proses untuk melakukan perubahan. Siagian memberikan pengertian tentang pembangunan sebagai “suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, Negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*)”. Sedangkan Ginanjar kartasasmita memberikan pengertian yang lebih sederhana, yaitu pembangunan sebagai “suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana”.

Pemikiran tentang pembangunan pada awalnya diartikan sama dengan modernisasi dan industrialisasi, bahkan pembangunan dengan westernisasi. Pemikiran tersebut didasarkan pada aspek perubahan, perkembangan, dan modernisasi serta industrialisasi secara keseluruhan mengandung unsur perubahan. Namun keempat hal tersebut mempunyai perbedaan yang cukup prinsip, karena masing-masing mempunyai latar belakang, asas dan hakikat yang berbeda meskipun semuanya merupakan bentuk yang merefleksikan perubahan.

Pembangunan (*development*) adalah proses perubahan yang mencakup seluruh sistem sosial, politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan, teknologi, kelembagaan, dan budaya. Portes mendefinisikan pembangunan sebagai

transformasi ekonomi, social dan budaya. Pembangunan adalah proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Kemudian, tikson menyebutkan bahwa pembangunan nasional dapat pula diartikan sebagai transformasi ekonomi, sosial dan budaya secara sengaja melalui kebijakan dan strategi menuju arah yang diinginkan. Transformasi dalam struktur ekonomi dapat dilihat melalui peningkatan atau perubahan produksi yang cepat di sektor industri dan jasa, sehingga kontribusinya terhadap pendapatan nasional semakin besar. Sebaliknya, kontribusi sektor pertanian akan menjadi semakin kecil dan berbanding terbalik dengan pertumbuhan industrialisasi dan modernisasi ekonomi. Transformasi sosial dapat dilihat melalui pendistribusian kemakmuran melalui pemerataan memperoleh akses terhadap sumber daya sosial, ekonomi, seperti pendidikan, kesehatan perumahan, air bersih, fasilitas rekreasi, dan partisipasi dalam proses pembuatan keputusan politik. Sedangkan transformasi budaya sering dikaitkan dengan bangkitnya semangat kebangsaan dan nasionalisme, disamping adanya perubahan nilai dan norma yang dianut masyarakat, seperti perubahan dari spiritualisme ke materialisme/sekularisme. Pergeseran dari penilaian yang tinggi terhadap penguasaan materi, dari kelembagaan tradisional menjadi organisasi modern dan nasional.

Dengan demikian, proses pembangunan terjadi disemua aspek kehidupan masyarakat, ekonomi, sosial, budaya dan politik yang berlangsung pada level makro (nasional) dan mikro (*community/group*). Makna penting dari

pembangunan adalah adanya kemajuan/perbaikan (*progress*), pertumbuhan dan diversifikasi.

Para ahli di atas berpendapat bahwa, pembangunan adalah semua proses perubahan yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar dan terencana. Sedangkan perkembangan adalah proses perubahan yang terjadi secara alami sebagai dampak dari adanya pembangunan.

Meningkatnya kompleksitas kehidupan masyarakat yang menyangkut berbagai aspek, pemikiran tentang modernisasi pun tidak hanya mencakup bidang ekonomi dan industri, melainkan telah merambah ke seluruh aspek yang dapat memengaruhi kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, modernisasi diartikan sebagai proses transformasi dan perubahan dalam masyarakat yang meliputi segala aspeknya, baik ekonomi, industri, sosial, maupun budayanya.

Proses modernisasi mengarah pada perbaikan, para ahli manajemen pembangunan menganggapnya sebagai suatu proses pembangunan, yaitu perubahan dari kehidupan tradisional menjadi modern, yang pada awal mulanya ditandai dengan adanya penggunaan alat-alat modern akan menggantikan alat-alat yang tradisional.

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, termasuk ilmu-ilmu sosial, para ahli manajemen pembangunan terus berupaya untuk menggali konsep-konsep pembangunan secara ilmiah. Dengan demikian, secara sederhana pembangunan dapat diartikan sebagai suatu upaya untuk melakukan perubahan menjadi lebih baik, yaitu adanya pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dan

terpeliharanya lingkungan (kesolehan sosial) serta lingkungan alam yang lestari. Sampai saat ini belum ditemukan adanya kesepakatan yang dapat menolak pernyataan tersebut. Hal ini diperkuat oleh siagian bahwa pembangunan diartikan sebagai diartikan sebagai suatu perubahan, mewujudkan suatu kondisi kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang lebih baik dari kondisi sekarang, sedangkan pembangunan sebagai suatu pertumbuhan menunjukkan kemampuan suatu kelompok untuk terus berkembang, baik secara kualitatif maupun kuantitatif dan merupakan sesuatu yang mutlak harus terjadi dalam pembangunan.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pada dasarnya pembangunan tidak dapat dipisahkan dari pertumbuhan sebagai akibat adanya pembangunan. Dalam hal ini pertumbuhan dapat berupa pengembangan/perluasan (*expansion*) atau peningkatan (*improvement*) dari aktivitas yang dilakukan oleh suatu komunitas masyarakat.

Istilah pembangunan diartikan secara berbeda sesuai dengan perspektifnya masing-masing para ahli, sehingga definisi tentang pembangunan menjadi beragam. Namun istilah pembangunan sesungguhnya dapat dikelompokkan ke dalam dua bagian berdasarkan periode waktunya yaitu pandangan lama berdasarkan ukuran-ukuran ekonomi tradisional dan pandangan baru ekonomi pembangunan.⁷⁵

⁷⁵Nurman, *Op. Cit.* h. 87.

I. Kedudukan, Tugas dan Fungsi BAPPEDA

Berdasarkan Keputusan Presiden No.27 Tahun 1980, BAPPEDA terbagi menjadi BAPPEDA tingkat I dan BAPPEDA tingkat II. BAPPEDA tingkat I mencakup Provinsi yang mempunyai tugas membantu Gubernur/ Kepala Daerah tingkat I dalam menentukan kebijaksanaan di bidang perencanaan pembangunan di Daerah serta penilaian atas pelaksanaannya. Sedangkan BAPPEDA Tingkat II mencakup Kabupaten/ Kota Madya mempunyai tugas membantu Bupati/ Walikota madya Kepala Daerah tingkat II dalam membentuk kebijaksanaan di bidang perencanaan pembangunan di Daerah Tingkat II serta penilaian atas pelaksanaannya.

Pemerintah dalam melaksanakan perencanaan Pembangunan di Daerah, BAPPEDA Tingkat I dan BAPPEDA Tingkat II berkewajiban mengusahakan keterpaduan antara rencana Nasional dan Daerah serta mengkoordinasikan aspek-aspek perencanaan dari seluruh unit vertikal yang terdapat dalam wilayahnya.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud BAPPEDA Tingkat I mempunyai fungsi:

1. Menyusun Pola Dasar Pembangunan Daerah yang terdiri atas Pola Umum Pembangunan Daerah jangka panjang dan Pola Umum PELITA Daerah Tingkat I.
2. Menyusun REPELITA Daerah Tingkat I.

3. Menyusun program-program tahunan sebagai pelaksanaan rencana-rencana tersebut yang dibiayai oleh Daerah sendiri ataupun yang diusulkan kepada Pemerintah Pusat untuk dimasukkan ke dalam program tahunan nasional.
4. Melakukan koordinasi perencanaan di antara Dinas-dinas Satuan Organisasi lain dalam lingkungan Pemerintah Daerah, Instansi-Instansi vertikal Daerah-daerah tingkat II dan Badan-badan lain yang berada dalam wilayah Daerah Tingkat I yang bersangkutan.
5. Menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat I bersama-sama dengan Biro Keuangan Daerah Dengan koordinasi Sekretaris Wilayah Daerah Tingkat I.
6. Melaksanakan koordinasi dan atau mengadakan penelitian untuk kepentingan perencanaan pembangunan di Daerah.
7. Mengikuti persiapan dan perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan di Daerah untuk penyempurnaan perencanaan lebih lanjut.
8. Memonitor pelaksanaan pembangunan di Daerah.
9. Melakukan kegiatan-kegiatan lain dalam rangka perencanaan sesuai dengan petunjuk Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.

Sedangkan untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana BAPPEDA Tingkat II mempunyai fungsi:

1. Menyusun pola Dasar Pembangunan Daerah yang terdiri atas Pola Umum Pembangunan Daerah jangka panjang dan Pola Umum REPELITA Daerah Tingkat II.

2. Menyusun REPELITA Daerah Tingkat II.
3. Menyusun program-program tahunan sebagai pelaksanaan rencanarencana tersebut yang biayai oleh Daerah sendiri ataupun yang diusulkan kepada Pemerintah Daerah Tingkat I untuk dimasukkan kedalam program Daerah Tingkat I dan atau yang diusulkan kepada Pemerintah Daerah Tingkat I untuk dimasukkan ke dalam program Daerah Tingkat I dan atau yang diusulkan kepada Pemerintah Pusat untuk dimasukkan ke dalam program tahunan nasional.
4. Melakukan koordinasi perencanaan di antara Dinas-dinas Satuan Organisasi lain dalam lingkungan Pemerintah Daerah Instansi-instansi Vertikal kecamatan-kecamatan, dan Badan-badan lain yang berada dalam wilayah Daerah Tingkat II yang bersangkutan.
5. Menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II bersama-sama dengan Bagian keuangan Daerah dengan koordinasi Sekretaris wilayah Daerah Tingkat II.
6. Melaksanakan koordinasi dan atau mengadakan penelitian untuk kepentingan perencanaan pembangunan di Daerah.
7. Mengikuti persiapan dan perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan di Daerah untuk penyempurnaan perencanaan lebih lanjut.
8. Memonitor pelaksanaan pembangunan di Daerah.

9. Melakukan kegiatan-kegiatan lain dalam rangka perencanaan sesuai dengan petunjuk Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II.⁷⁶

BAPPEDA merupakan unit organisasi perencanaan, dimana keberadaanya sangat diharapkan untuk dapat melaksanakan otonomi di bidang perencanaan pembangunan daerah secara lebih efektif dan efisien serta bertanggung jawab, sehingga pembangunan dapat terlaksana dengan perencanaan yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pembangunan, sehingga dituntut melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara optimal.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 63 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan pembangunan Daerah, Bappeda merupakan Unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :

1. Penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan;
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan pembangunan;
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan pembangunan;

⁷⁶Keputusan Presiden RI Nomor 27 Tahun 1980 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.⁷⁷



⁷⁷Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 63 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan pembangunan Daerah

BAB III

LAPORAN PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Lampung Barat

1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Lampung Barat dibentuk berdasarkan UU No. 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara RI No. 3452); dan pada Tahun 2012 mengalami pemekaran menjadi DOB Pesisir Barat melalui UU No. 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara RI Tahun 2012 No. 231, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5364), maka luas indikatif wilayah administrasi Lampung Barat menjadi 2.064,40 km².⁷⁸

Luas Wilayah, Jumlah Pekon/Kelurahan, dan Ibu Kota Kecamatan di Kabupaten Lampung Barat.

No	Kecamatan	Luas (Km2)	Jumlah Pekon	Jumlah Kelurahan	Ibu Kota Kecamatan
1	Balik Bukit	175,63	10	2	Pasar Liwa
2	Sukau	223,10	10	0	Buay nyerupa
3	Lombok Seminung	22,40	11	0	Lumbok
4	Belalau	217,93	10	0	Kenali
5	Sekincau	118,28	4	1	Pampangan
6	Suoh	170,77	7	0	Sumber agung
7	Batubrak	261,55	11	0	Pekon balak
8	Pagar Dewa	110,19	10	0	Basungan
9	Batu Ketulis	103,70	10	0	Bakhu

⁷⁸Agustanto Basmar, Sekretaris Bappeda, wawancara dengan penulis, Lampung Barat, 26 Juni 2018

Batas-batas wilayah Kabupaten Lampung Barat adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten OKU Selatan (Provinsi Sumatera Selatan) dan Kabupaten Way Kanan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Tanggamus, dan Kabupaten Lampung Tengah;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Pesisir Barat dan Kabupaten Tanggamus;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Pesisir Barat.⁷⁹

2. Letak dan Kondisi Geografis

Lampung Barat merupakan dataran tinggi dengan ketinggian rata-rata + 645 meter diatas permukaan laut. Berdasarkan Georeferensi: Datum WGS 84, UTM -48S Peta Rupa Bumi Provinsi Lampung (RBI 1:50K) , posisi astronomis Lampung Barat terletak pada Koordinat 04°51'26" - 05°20'26" Lintang Selatan dan 103°50'13" - 104°33'49" Bujur Timur.

Jarak antara Ibukota Kabupaten ke Daerah Kecamatan:

- | | |
|-------------------------|----------|
| 1. Liwa-Balik Bukit | : 04 km; |
| 2. Liwa-Sukau | : 16 km; |
| 3. Liwa-Lumbok Seminung | : 48 km; |
| 4. Liwa-Batubrak | : 21 km; |
| 5. Liwa-Belalau | : 34 km; |

⁷⁹ *Ibid.*

6. Liwa-Bandar Negeri Suoh : 48 km;
7. Liwa-Batu Ketulis : 40km;
8. Liwa-Suoh : 40 km;
9. Liwa-Pagar Dewa : 77 km;
- 10.Liwa-Sekincau : 30 km;
- 11.Liwa-Sumber Jaya : 67 km;
- 12.Liwa-Way Tenong : 60 km.⁸⁰

3. Demografi

Kabupaten Lampung Barat meliputi 15 kecamatan, 131 pekon dan 5 kelurahan, dengan jumlah Penduduk pada Tahun 2018 sebesar 295.689 jiwa (157.088 laki – laki dan 138.601 perempuan). Ditinjau dari tingkat usianya, penduduk Kabupaten Lampung Barat didominasi oleh penduduk usia muda, yaitu berkisar antara 20 Tahun hingga 45 Tahun. Tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Lampung Barat masih timpang atau tidak merata antar wilayah. Kepadatan penduduk tertinggi berada di Kecamatan Kebun Tebu 1.436 jiwa/km² sedangkan kepadatan penduduk terendah terdapat di Kecamatan Batu Brak yaitu 49,75 jiwa/km^{2.81}

Jumlah penduduk terbesar terdapat di Kecamatan Way Tenong yaitu 33.616 jiwa dan jumlah penduduk terendah berada di Kecamatan Lumbok

⁸⁰*Ibid.*

⁸¹Data Demografi Kabupaten Lampung Barat 2018

Seminung 6.699 jiwa. Secara lengkap jumlah penduduk dan kepadatan penduduk per kecamatan disajikan pada Tabel di bawah ini.

Tabel: Jumlah Penduduk dan Kepadatan Per Kecamatan Tahun 2018

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)	Kepadatan penduduk (per Km ²)
1	Balik bukit	37,873	215,64
2	Sukau	21,095	94,55
3	Lumbok seminung	6,699	299,06
4	Belalau	12,490	57,31
5	Sekincau	18,418	155,72
6	Suoh	18,202	159,1
7	Batubrak	13,012	49,75
8	Pagar dewa	19,926	180,83
9	Batu ketulis	14,929	143,96
10	Bandar negeri suoh	27,169	106,54
11	Sumber jaya	23,789	121,76
12	Way tenong	33,616	288,13
13	Gedung surian	15,458	177,39
14	Kebun tebu	20,943	1.436,42
15	Air hitam	12,070	158,34
		296,689	143,23

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Barat tahun 2018

Ditinjau dari perkembangannya, laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Lampung Barat selama kurun waktu lima Tahun terakhir cenderung menurun. Pada Tahun 2015 yang lalu, penduduk Kabupaten Lampung Barat tumbuh sebesar 1,62 persen, dan terus mengalami perlambatan hingga Tahun 2018 menjadi sebesar 0,88 persen.⁸²

B. Gambaran Umum Bappeda Kabupaten Lampung Barat

1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

BAPPEDA merupakan unit organisasi perencanaan, dimana keberadaannya sangat diharapkan untuk dapat melaksanakan otonomi di bidang perencanaan pembangunan daerah secara lebih efektif dan efisien serta bertanggung jawab, sehingga pembangunan dapat terlaksana dengan perencanaan yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pembangunan, sehingga dituntut melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara optimal.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 63 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan pembangunan Daerah, Bappeda merupakan Unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah. Untuk

⁸²*Ibid.*

menyelenggarakan tugas tersebut Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :

- f. Penyusunan kebijakan teknis dibidang perencanaan pembangunan;
- g. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan pembangunan;
- h. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan pembangunan;
- i. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan; dan
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.⁸³

2. Struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

a. Kepala Badan

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Bappeda mempunyai fungsi :

- 1) Penyusunan kebijakan teknis di bidang Perencanaan Pembangunan;
- 2) Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Perencanaan Pembangunan;

⁸³ Agustanto Basmar, Sekretaris Bappeda, wawancara dengan penulis, Lampung Barat, 26 Juni 2018

- 3) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Perencanaan Pembangunan;
- 4) Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di bidang Perencanaan Pembangunan; dan
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.⁸⁴

b. Sekretariat

Sekretariat Bappeda Kabupaten Lampung Barat dipimpin oleh seorang Sekretaris Bappeda. Sekretariat Bappeda mempunyai tugas mengkoordinasikan dan menyelenggarakan kegiatan kesekretariatan, pengelolaan keuangan dan pelayanan administrasi pada seluruh unit organisasi di lingkungan Bappeda serta melakukan penyusunan program, evaluasi dan pelaporan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Sekretariat Bappeda mempunyai fungsi :

- 1) Pelaksanaan koordinasi dalam penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Bappeda.
- 2) Pelaksanaan tugas administratif umum dan administrasi kepegawaian, perlengkapan, keuangan, kearsipan dan kerumah tanggaan.
- 3) Pelaksanaan administrasi dan

⁸⁴ *Ibid.*

- 4) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program sekretariat dan lingkup Bappeda.⁸⁵

Sekretariat Bappeda Kabupaten Lampung Barat terdiri dari Sub Bagian Perencanaan, Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Keuangan. Sub Bagian Perencanaan, Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian.

a) Kepala Sub Bagian Perencanaan, Umum dan Kepegawaian

Kepala Sub Bagian Perencanaan, Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan dalam rangka membantu melaksanakan penjabaran kebijakan teknis di bidang sub bagian Perencanaan, umum, dan kepegawaian.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Sub Bagian Perencanaan, Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

1. Pengelolaan administrasi umum administrasi kepegawaian dan perencanaan;
2. Pengelolaan kearsipan, kerumah tanggaan dan perlengkapan di lingkungan badan; dan
3. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di Sub Bagian Umum dan Perencanaan;⁸⁶

b) Kepala Sub Bagian Keuangan

⁸⁵*Ibid.*

⁸⁶*Ibid.*

Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan rencana anggaran pendapatan dan belanja, melakukan kegiatan perbendaharaan, pembukuan dan verifikasi serta melakukan pelaporan atas realisasi pelaksanaan kegiatan keuangan Badan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :

1. Pengelolaan administrasi keuangan;
2. Penyiapan bahan penyusunan anggaran di lingkungan badan;
3. Penyusunan laporan keuangan badan dan pelayanan bidang keuangan; dan
4. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di sub bagian keuangan.⁸⁷

c) Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan, membina dan mengkoordinasikan serta menyelenggarakan sebagian tugas Badan di bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana di atas, Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan mempunyai fungsi :

⁸⁷ *Ibid.*

1. Penyiapan rumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan;
2. Penyusunan rencana dan program kerja di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan;
3. Pelaksanaan dan pengkoordinasian perencanaan pembangunan di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan; dan
4. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan.⁸⁸

Bidang Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan terdiri dari :

a. Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan.

Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan mempunyai tugas menyiapkan bahan dalam rangka membantu melaksanakan penjabaran kebijakan teknis di bidang pengendalian dan evaluasi pembangunan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan mempunyai fungsi :

- 1) Penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian dan evaluasi pembangunan;
- 2) Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di bidang pengendalian dan evaluasi pembangunan;

⁸⁸ *Ibid.*

- 3) Penyiapan bahan penyelenggaraan kegiatan di bidang pengendalian dan evaluasi pembangunan; dan
- 4) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengendalian dan evaluasi pembangunan.⁸⁹

b. Sub Bidang Pendanaan APBD.

Sub Bidang Pendanaan APBD mempunyai tugas menyiapkan bahan dalam rangka membantu melaksanakan penjabaran kebijakan teknis di bidang pendanaan APBD yang meliputi Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD).

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Sub Bidang Pendanaan APBD menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis di bidang pendanaan APBD;
- 2) Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di bidang pendanaan APBD;
- 3) Penyiapan bahan penyelenggaraan kegiatan di bidang pendanaan APBD; dan
- 4) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pendanaan APBD.⁹⁰

⁸⁹*Ibid.*

⁹⁰*Ibid.*

c. Sub Bidang Pendanaan Non APBD.

Sub Bidang Pendanaan Non APBD mempunyai tugas menyiapkan bahan dalam rangka membantu melaksanakan penjabaran kebijakan teknis di bidang pendanaan Non APBD yang meliputi Dana Alokasi Khusus (DAK), Tugas Pembantuan (TP), Dekonsentrasi dan Coporate Social Responsibility (CSR).

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Sub Bidang Pendanaan Non APBD menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis di bidang pendanaan Non APBD;
- 2) Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di bidang pendanaan Non APBD;
- 3) Penyiapan bahan penyelenggaraan kegiatan di bidang pendanaan Non APBD; dan
- 4) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pendanaan Non APBD.⁹¹

d. Bidang Fisik

Bidang Fisik mempunyai tugas melaksanakan, membina dan mengkoordinasikan serta menyelenggarakan sebagian tugas Bappeda di bidangfisik meliputi infrastruktur, prasarana wilayah tata ruang, pemukiman, sumber daya alam dan lingkungan hidup.

⁹¹*Ibid.*

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana di atas, Bidang fisik mempunyai fungsi:

- 1) Penyiapan rumusan kebijakan teknis di bidang fisik meliputi infrastruktur, prasarana wilayah tata ruang, pemukiman, sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- 2) Penyusunan rencana dan program kerja di bidang fisik meliputi infrastruktur, prasarana wilayah tata ruang, pemukiman, sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- 3) Pelaksanaan dan pengkoordinasian kegiatan di bidang fisik meliputi infrastruktur, prasarana wilayah tata ruang, pemukiman, sumber daya alam dan lingkungan hidup; dan
- 4) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang fisik meliputi infrastruktur, prasarana wilayah tata ruang, pemukiman, sumber daya alam dan lingkungan hidup.⁹²

Bidang Fisik terdiri dari :

- a) Sub Bidang Infrastruktur dan Prasarana Wilayah.

Sub Bidang Infrastruktur dan Prasarana Wilayah mempunyai tugas menyiapkan bahan dalam rangka membantu melaksanakan penjabaran kebijakan teknis di bidang infrastruktur dan prasarana wilayah yang meliputi jembatan, jalan, transportasi (perhubungan), informatika, energi dan sumberdaya mineral.

⁹²*Ibid.*

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Sub Bidang Infrastruktur dan Prasarana Wilayah menyelenggarakan fungsi :

1. Penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis di bidang infrastruktur dan prasarana wilayah;
2. Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di bidang infrastruktur dan prasarana wilayah;
3. Penyiapan bahan penyelenggaraan kegiatan di bidang infrastruktur dan prasarana wilayah; dan
4. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang infrastruktur dan prasarana wilayah.⁹³

b) Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas menyiapkan bahan dalam rangka membantu melaksanakan penjabaran kebijakan teknis di bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang meliputi Lingkungan Hidup, Pariwisata, Kehutanan, Irigasi dan Sanitasi.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi :

1. Penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup;

⁹³ *Ibid.*

2. Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup;
3. Penyiapan bahan penyelenggaraan kegiatan di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup; dan
4. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup.⁹⁴

c) Sub Bidang Tata Ruang dan Pemukiman.

Sub Bidang Tata Ruang dan Pemukiman mempunyai tugas menyiapkan bahan dalam rangka membantu melaksanakan penjabaran kebijakan teknis di bidang tata ruang dan permukiman yang meliputi penataan ruang, pemukiman, keciptakaryaan, kebencanaan, ruang terbuka hijau dan pertamanan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Sub Bidang Tata Ruang dan Pemukiman menyelenggarakan fungsi :

1. Penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis di bidang tata ruang dan pemukiman;
2. Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di bidang tata ruang dan pemukiman;
3. Penyiapan bahan penyelenggaraan kegiatan di bidang tata ruang dan pemukiman; dan

⁹⁴*Ibid.*

4. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang tata ruang dan pemukiman.⁹⁵

e. Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat

Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan, membina dan mengkoordinasikan serta menyelenggarakan sebagian tugas Badan di bidang perekonomian dan kesejahteraan rakyat.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan rumusan kebijakan teknis di bidang perekonomian dan kesejahteraan rakyat;
2. Penyusunan rencana dan program kerja di bidang perekonomian dan kesejahteraan rakyat;
3. Pelaksanaan dan pengkoordinasian perencanaan pembangunan di bidang perekonomian dan kesejahteraan rakyat; dan
4. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang perekonomian dan kesejahteraan rakyat.⁹⁶

Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Terdiri dari :

- a) Sub Bidang Pengembangan Ekonomi Produktif.

⁹⁵*Ibid.*

⁹⁶*Ibid.*

Sub Bidang Pengembangan Ekonomi Produktif mempunyai tugas menyiapkan bahan dalam rangka membantu melaksanakan penjabaran kebijakan teknis di bidang pengembangan ekonomi produktif yang meliputi pertanian, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, penyuluhan, ketahanan pangan, koperasi, industri, perdagangan dan penanaman modal.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Sub Bidang Pengembangan Ekonomi Produktif menyelenggarakan fungsi :

1. Penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan ekonomi produktif;
2. Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di bidang pengembangan ekonomi produktif;
3. Penyiapan bahan penyelenggaraan kegiatan di bidang pengembangan ekonomi produktif; dan
4. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengembangan ekonomi produktif.⁹⁷

b) Sub Bidang Pendidikan, Hukum dan Pemerintahan

Sub Bidang Pendidikan, Hukum dan Pemerintahan mempunyai tugas menyiapkan bahan dalam rangka membantu melaksanakan penjabaran kebijakan teknis di bidang pendidikan, hukum dan pemerintahan.

⁹⁷ *Ibid.*

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Sub Bidang Pendidikan, Hukum dan Pemerintahan menyelenggarakan fungsi :

1. Penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan, hukum dan pemerintahan;
2. Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di bidang pendidikan, hukum dan pemerintahan;
3. Penyiapan bahan penyelenggaraan kegiatan di bidang pendidikan, hukum dan pemerintahan; dan
4. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pendidikan, hukum dan pemerintahan.⁹⁸

c) Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat.

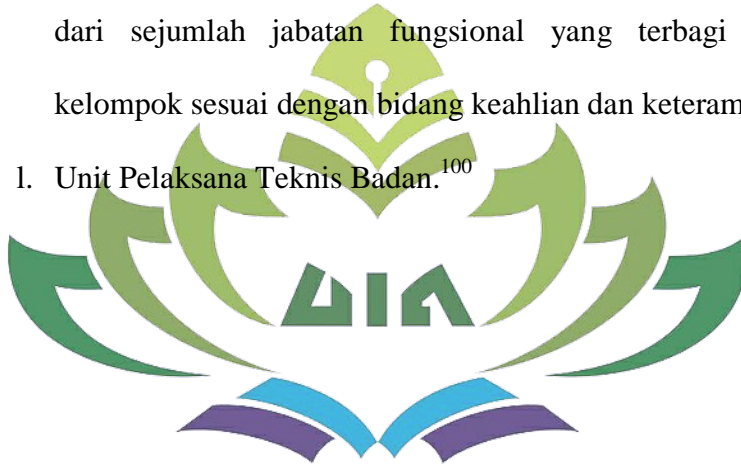
Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas menyiapkan bahan dalam rangka membantu melaksanakan penjabaran kebijakan teknis di bidang kesejahteraan rakyat yang meliputi kesehatan, agama, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, kependudukan, sosial dan tenaga kerja.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi :

1. Penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis di bidang kesejahteraan rakyat;

⁹⁸ *Ibid.*

2. Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di bidang kesejahteraan rakyat;
 3. Penyiapan bahan penyelenggaraan kegiatan di bidang kesejahteraan rakyat; dan
 4. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang kesejahteraan rakyat.⁹⁹
- k. Kelompok Jabatan FungsionalKelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- l. Unit Pelaksana Teknis Badan.¹⁰⁰



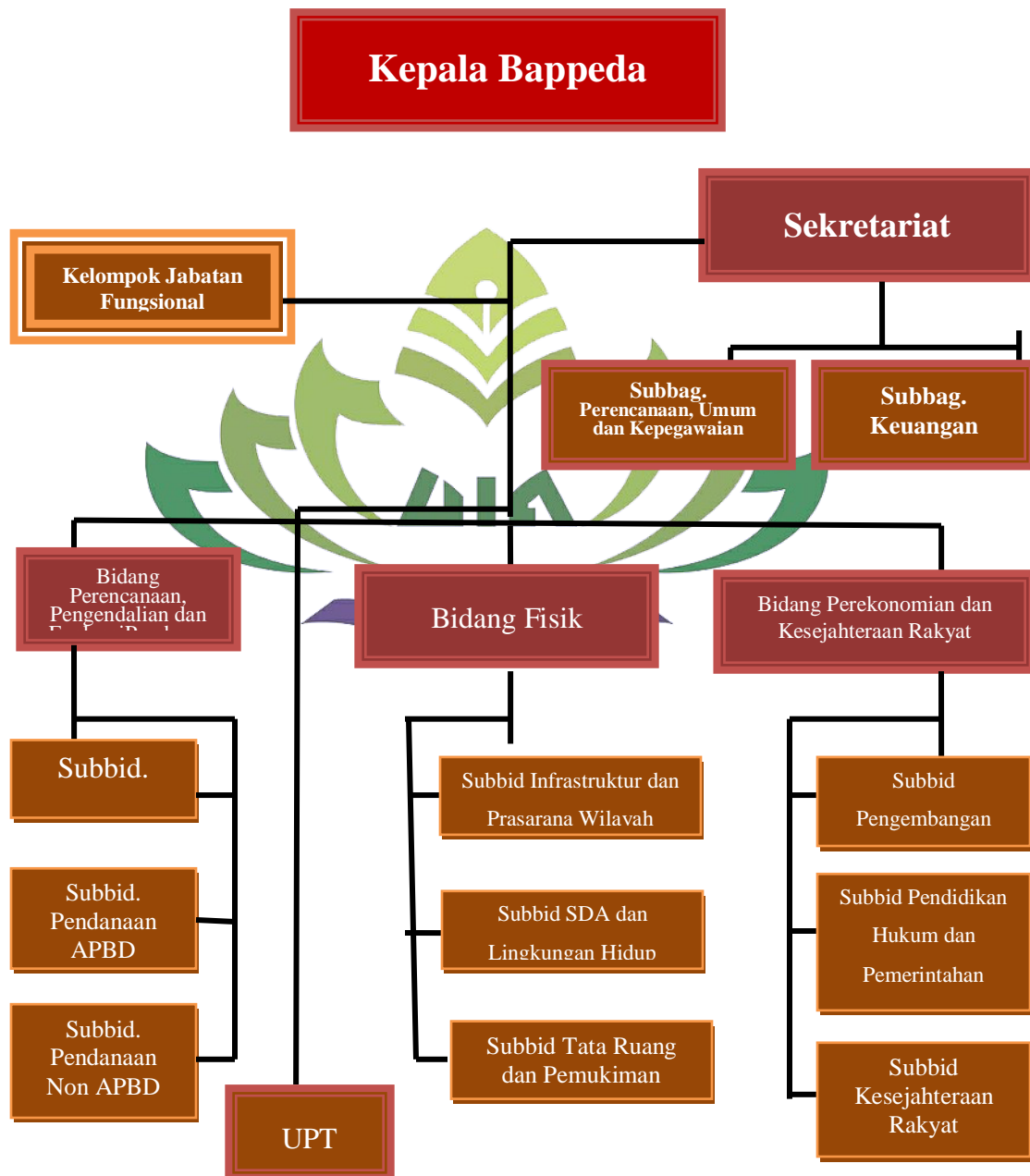
⁹⁹*Ibid.*

¹⁰⁰*Ibid.*

Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kabupaten Lampung Barat dilihat padagambar berikut :

Gambar: Bagan Struktur Organisasi Bappeda Kabupaten Lampung Barat



3.Sarana Dan Prasarana Bappeda

Sarana dan Prasarana pendukung kelancaran pelaksanaan tugas Program kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang adalah sebagai berikut :

Tabel: Sarana dan Prasarana yang ada di Bappeda

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Drone	1
2	Gorden	2
3	Kanopi Garasi	1
4	UPS Server	2
5	UPS	2
6	Stabilizer	2
7	Sound System (SP Alpha Sound WLS 15')	1
8	Sound System (SP Hard Guset 15')	2
9	Sound System (Tiang SPK 15')	3
10	Mobil Minibus	2
11	Mobil Pick Up	1
12	Motor Roda 2	6
13	Meja Biro	3
14	Meja $\frac{1}{2}$ Biro	32
15	Kursi Lipat	140
16	Meja Komputer	7
17	Kursi Putar	17
18	Meja Rapat Besar	12
19	Meja Rapat Kecil	3
20	Kursi Tamu	2
21	Sice	1
22	Lemari Buku	5
23	Lemari Besi	2
24	Filling Kabinet	5
25	Laptop	8
26	Komputer	10
27	Server	1
28	GPS	2

29	Printer	7
30	Telpon	1
31	Mesin Fax	1
32	Kamera	2
33	Penghancur Kertas	2
34	Mesin Tik	3
35	Meja Rapat Bundar	1
36	Kursi Putar Rapat	4
37	Kursi $\frac{1}{2}$ Biro	11
38	Podium	1
39	Genset	2
40	Wireles TOA	1
41	Sound Sistem	1

Sumber: Bappeda Kabupaten Lampung Barat Juli 2018

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Bappeda didukung Sarana operasional kendaraan roda empat sebanyak 3 unit dan kendaraan roda dua sebanyak 5 unit. Kondisi ini sudah cukup baik untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.¹⁰¹

C. Pelaksanaan Bappeda dalam Pembangunan di Kabupaten Lampung Barat

Pelaksanaan pembangunan daerah, tidak terlepas dari peran serta pemangku kepentingan yaitu pemerintah daerah, masyarakat dan swasta. Komitmen bersama serta konsistensi dalam melaksanakan program kegiatan yang telah di rumuskan menjadi kunci utama dalam mencapai pembangunan yang berkesinambungan dan berkelanjutan.

Bappeda kabupaten Lampung Barat menjadi salah satu perangkat daerah yang bertugas melaksanakan fungsi perencanaan dalam hal pembangunan daerah,

¹⁰¹*Ibid.*

wujud peranan Bappeda dalam melaksanakan pembangunan dalam hal perencanaan tentu saja dapat di lihat dari berbagai aspek. Oleh karena itu, untuk memaksimalkan peranannya, Bappeda melaksanakannya sesuai dengan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan. Seperti yang diutarakan oleh kepala Bappeda Kabupaten Lampung Barat bapak Okmal, bahwa : Sejauh ini, untuk melihat peranan Bappeda dalam hal pembangunan daerah di segala bidang, tentunya perlu di telusuri terlebih dahulu apa yang menjadi tugas pokok dan fungsi Bappeda sendiri. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya itulah, tentunya Bappeda telah melaksanakan serangkaian proses yang berkaitan dengan pembangunan daerah, baik itu dari proses perencanaan, pelaksanaan hingga proses evaluasi.¹⁰²

Sebagaimana yang telah diutarakan oleh Bapak Kepala Bappeda, diketahui bahwa salah satu tolak ukur peranan Bappeda dalam pembangunan daerah adalah dilihat dari aspek pelaksanaan fungsi Bappeda itu sendiri, dimana dalam pelaksanaannya berbagai aktivitas yang berdampak pada perumusan perencanaan pembangunan yang merupakan faktor kunci dan awal keberhasilan dari pencapaian tujuan pembangunan dalam berbagai bidang.

Eksistensi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Barat dalam pencapaian kinerjanya dapat diukur melalui program yang dicanangkan sebagai bagian dari keseluruhan proses pembangunan daerah dengan menyerasikan langkah dan kegiatan perencanaan program pembangunan yang dilakukan setiap tahun melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai

¹⁰² Okmal, Kepala Bappeda, wawancara dengan penulis, Lampung Barat, 26 juli 2018.

pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pembangunan Belanja Daerah (RAPBD).

1. Proses Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

Pada sisi proses perencanaan, Bappeda Kabupaten Lampung Barat selama ini telah mengupayakan agar dapat berlangsung sesuai mekanisme yang telah diatur. Seyogyanya setiap perencanaan pembangunan berangkat dari hasil proses dan mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG). Hal ini tidak lepas dari perencanaan pembangunan daerah sebagai suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Proses perumusan perencanaan pembangunan merupakan salah satu bagian tahapan yang dapat dilihat dalam proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG). Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang dimaksud adalah forum konsultasi publik antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau biasa di singkat RKPD Kabupaten.

Menyusun Rencana Pembangunan Tahunan Daerah adalah bentuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dilakukan melalui pelaksanaan

penyerapan dan penyaringan aspirasi berupa forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG). Sebelum pelaksanaan Musrenbang didahului dengan beberapa tahapan proses perumusan arah dan kebijakan yang menjadi dasar pengambilan keputusan dan kesepakatan terhadap Rancangan awal RKPD.

2. Proses Penyelenggaraan Musyarwarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) di Kabupaten Lampung Barat

Proses pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten Lampung Barat dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu Musrenbang Desa/Kelurahan; memuat hasil prioritas kegiatan pembangunan di tingkat desa/kelurahan berdasarkan RPJM desa dan permasalahan yang sedang dihadapi, kemudian dilanjutkan dalam forum Musrenbang Kecamatan; memuat daftar prioritas kegiatan pembangunan di tiap desa berdasarkan hasil kesepakatan forum, tahapan dilaksanakan Forum SKPD dan Forum Gabungan SKPD; memuat hasil prioritas kegiatan pembangunan tingkat kecamatan sesuai dengan fungsi dan rencana kerja tiap-tiap satuan kerja perangkat daerah. Kemudian dilaksanakan Musrenbang RKPD Kabupaten; penetapan arah kebijakan pembangunan berdasarkan penyempurnaan hasil prioritas kegiatan di tingkat kecamatan dan rencana kerja masing-masing satuan kerja perangkat daerah berupa penetapan yang menghasilkan rancangan akhir Rencana Kerja Pembangunan Daerah untuk dikaji bersama kelayakannya untuk proses penetapan.

D. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap proses perumusan kebijakan teknis

Peranan Bappeda terhadap pembangunan di kabupaten dilihat dari sejauhmana pelaksanaan fungsi Bappeda sendiri, serta bagaimana melaksanakan proses perumusan kebijakan teknis yang tercermin dalam proses pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) yang telah digambarkan sebelumnya.

Dalam hal proses perumusan kebijakan teknis, terdapat beberapa faktor-faktor yang berpengaruh. Tidak bisa dipungkiri ada banyak hal yang bisa mempengaruhi proses pelaksanaan perumusan kebijakan tersebut, baik faktor-faktor yang mendukung maupun faktor-faktor yang menghambat berjalannya proses tersebut.

1. Faktor Pendukung

Keberhasilan Pemerintah Daerah dalam merumuskan suatu kebijakan dibidang perencanaan pembangunan yang terlaksana dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan mulai dari tingkat Desa/Kelurahan sampai pada tingkat kabupaten tentunya karena di tunjang oleh beberapa faktor.

Dalam hasil penelitian dan wawancara terhadap narasumber yang ada, maka di simpulkan bahwa yang menjadi faktor pendukung pemerintah dalam menetapkan kebijakan teknis perencanaan pembangunan adalah sebagai berikut:

b. Adanya Koordinasi

Koordinasi dalam pelaksanaan suatu rencana, pada dasarnya merupakan suatu aspek dari pengendalian yang sangat penting. Dalam praktek penyusunan rencana pembangunan di Kabupaten Lampung Barat, dalam hal ini Musyawarah Perencanaan Pembangunan, koordinasi menjadi arti penting dalam mengatur jalannya beragam tahapan dan kepentingan untuk dirumuskan dalam koridor bersama demi tercapainya tujuan bersama.

Konteks Bappeda yang mempunyai areal kerja dalam mengkoordinasikan setiap perangkat perumusan rencana pembangunan di daerah, maka perlu adanya langkah-langkah mewujudkan prinsip-prinsip pengkoordinasian sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, seperti yang di utarakan oleh Kepala Bappeda Kabupaten Lampung Barat Bapak Okmal, bahwasanya : Pada saat mengadakan rapat-rapat koordinasi tentang perencanaan pembangunan, pihak Bappeda selalu mengikuti aturan yang sudah tertuang dalam aturan perundang-undangan.¹⁰³

Hasil penelitian dan wawancara terhadap narasumber, dapat disimpulkan bahwa adanya koordinasi antar pihak-pihak dalam proses perumusan kebijakan perencanaan pembangunan merupakan suatu kelancaran proses penetapan kebijakan perencanaan pembangunan daerah.

¹⁰³*Ibid.*

c. Partisipasi Masyarakat

Tingkat partisipasi masyarakat terhadap proses perencanaan pembangunan di Kabupaten Lampung Barat menjadi salah satu indikator keberhasilan proses perumusan kebijakan dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan daerah karena dari masyarakatlah lahir usulan-usulan kegiatan perencanaan pembangunan. Meskipun pada kenyatannya, setiap masyarakat yang hadir dalam forum Musrenbang selalu saja menempatkan usulannya sebagai sesuatu yang harus didengar dan diprioritaskan. Namun dengan kehadiran masyarakat dalam setiap kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat tetap besar.

Pada hasil penelitian diketahui bahwa partisipasi masyarakat Kabupaten Lampung Barat dalam hal pembangunan daerah sangatlah tinggi, hal tersebut tergambar dari besarnya antusias masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam setiap kegiatan perencanaan pembangunan. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Azwan selaku Kepala Pekon Serungkuk, bahwa : Setiap mengadakan forum Musrenbang tahunan tingkat desa/kelurahan, warga yang ikut berpartisipasi lumayan banyak. Bahkan banyak diantaranya yang tidak diundang namun tetap hadir dalam forum tersebut. Akan tetapi kami selaku pemerintah di kelurahan memakluminya dan justru bersyukur karena tanpa kehadiran mereka tentunya kami tidak akan tahu hal apa yang

harus dibenahi terlebih dahulu untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan saat ini.¹⁰⁴

Hasil dari setiap wawancara terhadap narasumber menunjukkan bahwa masyarakat masih cenderung untuk ikut andil dalam proses perumusan kebijakan perencanaan pembangunan. Hal tersebut juga terlihat dari beberapa absensi kehadiran pada forum Musrenbang yang diadakan baik itu pada tingkat desa/kelurahan sampai ke tingkat Kabupaten.

Partisipasi masyarakat juga menjadi faktor yang mendukung pemerintah dalam setiap langkah penetapan kebijakan perencanaan pembangunan karena dari masyarakat sendirilah kebijakan-kebijakan tersebut berasal.

d. Komitmen Pemerintah

Komitmen adalah hal yang paling dibutuhkan dalam perumusan kebijakan perencanaan pembangunan. Dalam hal menjaga komitmen dan konsistensi dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Lampung Barat, komitmen telah diangkat sejak rapat pra persiapan Musrenbang dalam bentuk nota kesepahaman antar pihak yang terlibat dalam prosesnya kelak.

Hal tersebut diungkap pula dalam wawancara dengan bapak Siswanto Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan Statistik Bappeda Kabupaten Lampung Barat : Komitmen yang dibangun dalam menjaga konsistensi

¹⁰⁴ Azwan, Kepala Pekon Serungkuk, wawancara dengan penulis, Lampung Barat, 25 Juli 2018.

pembangunan daerah telah diamanatkan oleh Bupati Lampung Barat dalam pidato pembukaan rapat pra persiapan Musyawarah Perencanaan Pembangunan karena komitmen adalah bentuk dedikasi atau kewajiban yang mengikat seseorang kepada orang lain, hal tertentu, atau tindakan tertentu.¹⁰⁵

Selain adanya kesepakatan yang dibangun bersama pihak-pihak terkait, untuk menjamin komitmen juga diperlukan aturan-aturan yang mengikat serta pengawasan yang mendalam pada proses perencanaan tersebut.

Hasil wawancara tersebut, diketahui bahwa adanya komitmen menjadi satu hal yang sangat penting dan bahkan menjadi salah satu faktor yang menjadikan perumusan dan penetapan kebijakan pembangunan daerah lebih mudah dan lancar.

2. Faktor Penghambat

Proses penyelenggaraan Musrenbang untuk menetapkan suatu kebijakan teknis perencanaan pembangunan, tidak bisa di pungkiri bahwa terdapat hal-hal yang menghambat berjalannya proses tersebut, hal-hal atau faktor-faktor yang menghambat tersebut diketahui dari hasil penelitian dan wawancara terhadap narasumber yang ada. Pada hasil penelitian itulah diketahui bahwa faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan proses perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan adalah sebagai berikut :

¹⁰⁵Siswanto, Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan Statistik Bappeda, wawancara dengan penulis, Lampung Barat, 26 Juli 2018.

a. Penyesuaian/kesiapan anggaran

Kerangka anggaran menjadi hal yang mesti diperhatikan dalam proses perumusan dan penetapan kebijakan pembangunan, sehingga dalam pelaksanaannya pembagian alokasi dana terhadap rancangan awal RKPD yang memuat prioritas pembangunan daerah tidak terganggu.

Hasil Musrenbang memuat kerangka anggaran rencana kegiatan yang perlu dibiayai oleh sumber pendanaan baik itu APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN maupun sumber dana lainnya.

Proses perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan di Kabupaten Lampung Barat, hal yang paling memakan banyak waktu adalah persoalan bagaimana membagi dan menentukan besaran jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap usulan kegiatan yang di prioritaskan. Hal tersebut diungkap oleh Kepala Bappeda kabupaten Lampung Barat Bapak Okmal, yang mengatakan bahwa : Setelah masuk semua rekapitulasi hasil Musrenbang dari berbagai Kecamatan dan SKPD terkait, kasulitan yang dihadapi selanjutnya bagaimana menyempurnakan rancangan awal RKPD yang memuat prioritas pembangunan daerah dengan pemutakiran pendanaan yang berasal dari APBD dan APBN serta sumber pendanan lainnya.¹⁰⁶

Sama halnya pada Musrenbang tingkat kecamatan, untuk merangkum daftar usulan prioritas tentunya hal yang di pertimbangan terlebih dahulu adalah masalah anggaran, seperti yang di utarakan oleh Bapak Alfian Bahrin

¹⁰⁶*Ibid.*

selaku Camat Belalau yang mengatakan : Kami selalu berusaha memprioritaskan usulan-usulan dari masyarakat mengenai kegiatan yang mereka ajukan tapi lagi-lagi tidak semua bisa dipenuhi karena faktor anggaran yang tidak memadai.¹⁰⁷

Perhitungan alokasi anggaran terhadap usulan kegiatan pembangunan juga sangat penting karena akan menjadi bahan referensi anggota DPRD dari wilayah kecamatan yang bersangkutan, wawancara dengan bapak Ariswandi Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Lampung Barat mengungkapkan bahwa : Berita Acara hasil Musrenbang tetap akan menjadi referensi bagi DPRD dalam forum pembahasan Kebijakan Umum APBD Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan RAPBD, hasil tersebut biasanya diterima oleh anggota dewan dari wilayah pemilihan masing-masing kecamatan.¹⁰⁸

b. Usulan yang terlalu banyak

Perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan mengacu kepada usulan kegiatan yang ada pada musrenbang. Setiap usulan dibahas untuk selanjutnya di tetapkan sebagai usulan kegiatan prioritas dalam penetapan kebijakan. Dalam Pelaksanaan Musrenbang di Kabupaten Lampung Barat tidak terlepas dari proses pemilihan, begitu banyak usulan dari berbagai pihak-pihak yang berkepentingan maupun dari kelompok-kelompok masyarakat, namun dalam prosesnya terkadang penyaringan

¹⁰⁷ Alfian Bahrin, *Op. Cit.*

¹⁰⁸ Ariswandi, Ketua Komisi III DPRD, wawancara dengan penulis, Lampung Barat, 26 Juli 2018.

usulan kegiatan tersebut menjadi salah satu kendala yang cukup berarti bagi tim penyelenggara maupun pemerintah dalam proses Musrenbang.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa tingkat partisipasi masyarakat juga mempengaruhi munculnya begitu banyak usulan-usulan kegiatan. Semakin banyak masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan maka semakin banyak pula usulan yang diajukan dalam forum tersebut.

Permasalahan pokok adalah bagaimana menampung dan menyaring sekian banyak usulan yang ada, terkadang beberapa usulan yang diajukan oleh masyarakat tidak disepakati sehingga menimbulkan kekecewaan bagi pihak yang mengajukan. Kekecewaan masyarakat tentu saja menjadi hal yang dilematis bagi pemerintah dalam penentuan usulan prioritas kegiatan sehingga proses pelaksanaan Musrenbang memakan waktu yang cukup lama. Bapak Azwan selaku Kepala Desa Serungkuk menyambung bahwa : Setiap ada usulan dari masyarakat kami cukup kualahan dalam menampung semua dan menetapkan mana yang harus di sepakati mana yang belum bisa disepakati, hal tersebut sering merepotkan karena terulang-ulang dalam waktu yang cukup panjang.¹⁰⁹

c. Keterbatasan dokumen penunjang

Dalam pelaksanaan forum Musrenbang, salah satu yang menjadi hal penunjang kegiatan agar berjalan lancar adalah kelengkapan forum itu

¹⁰⁹ Azwan, *Op. Cit.*

sendiri, baik itu peserta, narasumber kegiatan, serta dokumen-dokumen penunjang lainnya. Seperti pada sebagian besar forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang diadakan di Kabupaten Lampung Barat, hal yang menjadi kekurangan dan permasalahannya yaitu kurangnya dokumen-dokumen acara seperti misalnya pada forum Musrenbang desa/kelurahan, pengadaan daftar permasalahan dan tantangan desa, peta kemiskinan dan pengangguran serta hasil pelaksanaan pembangunan desa/kelurahan pada tahun sebelumnya.

Begitupun pada Musrenbang tingkat kecamatan, forum SKPD sampai pada Musrenbang Kabupaten pun permasalahan-permasalahan kecil seperti itu selalu menjadi penghambat jalannya forum karena tentu saja tim penyelenggara maupun pemerintah akan kesulitan dalam menetapkan kebijakan jika hal seperti itu masih saja terjadi.

Penyediaan dokumen perencanaan yang terkait dengan pembangunan serta dokumen-dokumen lainnya yang berhubungan dengan agenda acara pada forum Musrenbang sangat menentukan kelancaran dan berhasil tidaknya tim penyelenggara dan pemerintah dalam menetapkan suatu kebijakan.

BAB IV

ANALISIS

A. Proses BAPPEDA dalam Perencanaan Pembangunan

Kabupaten Lampung Barat dibentuk berdasarkan UU No. 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara RI No. 3452); dan pada Tahun 2012 mengalami pemekaran menjadi DOB Pesisir Barat melalui UU No. 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara RI Tahun 2012 No. 231, Tambahan Lembaran Negara RI No: 5364), maka luas indikatif wilayah administrasi Lampung Barat menjadi 2.064,40 km².

Saat ini, Kabupaten Lampung Barat telah banyak mengalami kemajuan dari berbagai aspek baik teknologi, politik, ekonomi, sosial, maupun budaya. Kemajuan tersebut tidak terlepas dari peran perencanaan pemerintah dalam pembangunan, dalam hal ini Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) beserta seluruh pemangku kepentingan yang terkait.

Proses perencanaan pembangunan mutlak diperlukan sebagai salah satu upaya menata daerah secara terstruktur dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk itu pemerintah itu telah mengatur tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004. Dalam perencanaan pembangunan, pemerintah daerah harus mampu menjamin bahwa kegiatan pembangunan dapat berjalan efektif, efisien dan tepat sasaran.

Perencanaan pembangunan di Kabupaten Lampung Barat merupakan salah satu fungsi dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dalam melaksanakan fungsinya, terlebih dahulu melaksanakan berbagai proses perumusan kebijakan yang nantinya menjadi acuan dalam pelaksanaan rencana pembangunan daerah baik di tingkat desa/kelurahan, tingkat kecamatan, sampai di tingkat kabupaten.

Pelaksanaan fungsi BAPPEDA dalam pembangunan daerah dapat dilihat melalui proses perencanaan dan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah, proses perumusan kebijakan ini dimulai dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) tingkat desa/kelurahan, tingkat kecamatan, forum SKPD dan Forum Gabungan SKPD sampai pada musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Kabupaten. Proses yang dilakukan dalam hal perumusan kebijakan mulai dari pelaksanaan Musrembang tingkat desa/kelurahan sampai pada tingkat kabupaten tersebut adalah bertujuan untuk tercapainya pembangunan daerah di Kabupaten Lampung Barat secara maksimal.

Menyimak realita yang telah dijabarkan pada latar belakang penelitian, masih terdapatnya pembangunan yang belum maksimal dan merata di daerah-daerah di Indonesia akibat tidak terlaksananya peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BAPPEDA yang telah diatur oleh pemerintah. Sedangkan pembangunan daerah merupakan bagian internal dan integral dari pembangunan nasional, jika pembangunan daerah belum berjalan dengan maksimal dalam pelaksanaan

pembangunan maka bisa dikatakan pembangunan nasional juga belum dapat dikatakan berhasil. Oleh sebab itu, BAPPEDA dituntut menjalankan perannya sesuai standar perencanaan pembangunan yang telah ditetapkan sehingga hasil pembangunan dari perencanaan tersebut dapat sesuai dengan target pembangunan yang telah ditetapkan. Penelitian ini berdasarkan dengan Keputusan Presiden No. 27 Tahun 1980 yang mencakup peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA).

B. Tinjauan Fiqh Siyasah tentang Pelaksanaan BAPPEDA dalam Proses Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Lampung Barat

Badan perencanaan dan pembangunan daerah (BAPPEDA) merupakan salah satu instansi pemerintahan daerah yang diberikan tugas dalam menyusun perencanaan dan mengendalikan pembangunan Daerah. Perencanaan pada azasnya adalah proses penetapan sasaran (objektif) melalui pengambilan keputusan yang bertujuan untuk mencapai hasil sesuai dengan misi suatu organisasi. Tujuan dapat dicapai melalui hasil yang optimal di wilayah tertentu dengan kebijaksanaan yang terarah. Keputusan harus dibuat sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dengan keterbatasan yang dimiliki.

Terkait dengan arti dan kedudukan perencanaan dalam sebuah pembangunan dalam kajian *fiqh siyasah*, sebelum merencanakan sebuah pembangunan yang mana hal ini merupakan sesuatu yang universal kita juga harus mempunyai sebuah perencanaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahwa manusia harus memperhatikan dari setiap perbuatan yang dia kerjakan, serta harus

mempersiapkan diri (merencanakan) untuk selalu berbuat yang terbaik demi hari esok.

Konsep pembangunan dalam *fiqh siyasah* bersifat menyeluruh. Berbeda dengan konsep-konsep pembangunan lain yang lebih mengarah pada pengertian fisik dan materi, tujuan pembangunan dalam *fiqh siyasah* lebih dari itu. Bagi *fiqh siyasah* pembangunan yang dilakukan oleh manusia seharusnya hanya mengejar satu tujuan utama, yaitu: kesejahteraan ummah. Oleh karenanya, konsep pembangunan dalam *fiqh siyasah* dapat dikatakan sebagai usaha pembangunan oleh seluruh lapisan masyarakat untuk mewujudkan adanya manusia seutuhnya.

Landasan ini yang perlu mendapat penekanan. Karena tanpa terwujudnya manusia seutuhnya tersebut, suatu proses pembangunan dalam pandangan *fiqh siyasah* tidak akan berarti apa-apa. Tujuan yang bersifat tunggal ini semakin nampak apabila dikaji landasan-landasan pemikiran filosofis dalam pendekatan *fiqh siyasah* terhadap pembangunan. Ada empat landasan yang mendasari pemikiran mengenai konsep pembangunan menurut *fiqh siyasah*, yaitu:

Pertama, Tauhid (keesaan dan kedaulatan Allah SWT). Ajaran ini merupakan landasan dari aturan-aturan tentang hubungan Allah dengan manusia dan hubungan manusia dengan sesamanya. Konsep tauhid memegang peranan penting karena esensi dari segala sesuatu, termasuk aktivitas pembangunan adalah didasarkan pada ketundukan pada aturan Allah SWT. Pembangunan harus dilakukan dan diarahkan kepada upaya untuk melaksanakan segala ketentuan-Nya. Disini konsep tauhid dalam perencanaan pembangunan di kabupaten lampung

barat sudah sesuai dengan ajaran *fiqh siyasah*, yaitu Pembangunan harus dilakukan dan diarahkan kepada upaya untuk melaksanakan segala ketentuan-Nya. Adapun pelaku pembangunan adalah manusia. Manusia sebagai hamba Allah, juga sekaligus *khalifatullah fil ardh* (wakil Allah di muka bumi) bertugas untuk memakmurkan bumi.

Kedua, Rububyyah (ketentuan-ketentuan Allah SWT tentang rizki, rahmat dan petunjuk-Nya untuk menyempurnakan segala pemberian-Nya itu). Ajaran ini merupakan ketentuan Allah SWT. Mengenai alam semesta, pemanfaatan dan pengembangan sumber-sumber di dalamnya untuk kesejahteraan dan kelestarian kehidupan bersama. Dalam *fiqh siyasah* pelaksanaan fungsi BAPPEDA dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Lampung Barat sudah sesuai dengan ketentuan rububyyah, dimana para pegawai menyempurnakan segala petunjuk-Nya dan pemberian-Nya dengan menjalankan ketentuan-ketentuan Allah.

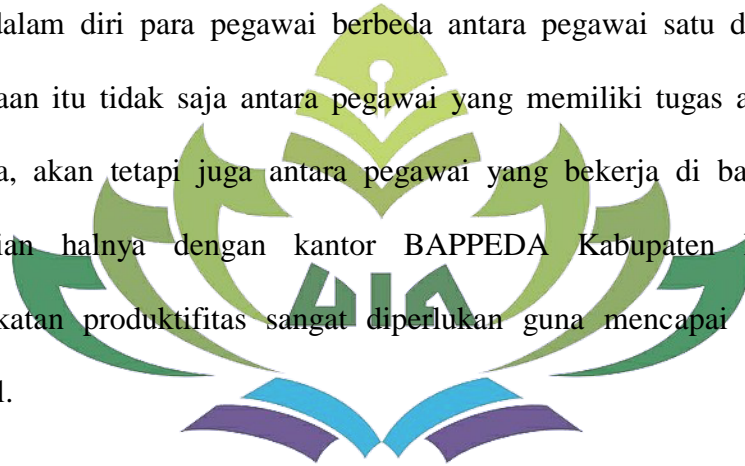
Ketiga, Khilafah (fungsi manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi). Ajaran ini menetapkan kedudukan dan peranan manusia, baik sebagai individu maupun anggota masyarakat, sebagai pengemban jabatan khilafah itu. Disini kelebihan konsep pembangunan *fiqh siyasah* dari konsep-konsep lainnya, dengan mendudukan peranan manusia pada tempat yang tinggi dan terhormat, tetapi sangat bertanggung jawab. Di sini pelaksanaan fungsi BAPPEDA dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Lampung sudah sesuai dengan *fiqh siyasah*, karena pegawainya sudah menunjukkan bahwa manusia itu sebagai makhluk Allah di muka bumi.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa BAPPEDA Kabupaten Lampung Barat telah menjalankan fungsinya sesuai dengan Keputusan Presiden No. 27 Tahun 1980. Hal tersebut dilihat dari peran BAPPEDA Kabupaten Lampung Barat dalam melakukan pembangunan yang juga disesuaikan dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2017 yang dibuat oleh BAPPEDA mengarah kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahap ke dua (2017-2022) Kabupaten Lampung Barat. Namun berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara, masih ada beberapa indikator yang belum berjalan dengan maksimal, seperti ketergantungan dana dari pusat menyebabkan tidak tepatnya jadwal penyusunan Rencana Anggaran Pembangunan Daerah, karena penyusunan anggaran daerah bergantung kepada dana dari pusat. Hal tersebut menyebabkan masih sering terjadi keterlambatan dalam penyusunan APBD. BAPPEDA Kabupaten Lampung Barat dapat meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Instansi Vertikal di daerah sehingga dapat mendukung terlaksananya fungsi BAPPEDA yang baik dan kegiatan pembangunan dapat berjalan efektif, efisien dan tepat sasaran.

Keempat, Tazkiyah (penyucian dan pengembangan). Tugas yang dibebankan ke pundak para rasul Allah adalah melakukan tazkiyah (penyucian) manusia dalam segala hubungan dan pergaulannya dengan Allah, dengan manusia sesamanya, dengan lingkungan alamnya, dan dengan masyarakat serta bangsa dan negaranya. Dalam pelaksanaan fungsi Bappeda di kabupaten Lampung Barat sudah sesuai dengan konsep takziyah karena BAPPEDA di Lampung Barat sudah menangani berbagai isu-isu yang ada keterkaitan dengan urusan kehidupan dan

penghidupan, khususnya dalam upaya kesejahteraan didunia sekaligus menggapai kebahagiaan di akhirat kelak.

Upaya untuk meningkatkan produktivitas kerja pegawai dalam suatu organisasi yang nantinya diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja. Meningkat atau menurunnya kinerja pegawai dalam suatu organisasi sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor internal dan maupun faktor eksternal yang timbul pada organisasi bersangkutan. Oleh sebab itu timbulnya motivasi kerja dalam diri para pegawai berbeda antara pegawai satu dengan yang lain, perbedaan itu tidak saja antara pegawai yang memiliki tugas atau jabatan yang berbeda, akan tetapi juga antara pegawai yang bekerja di bagian yang sama. Demikian halnya dengan kantor BAPPEDA Kabupaten Lampung Barat, peningkatan produktifitas sangat diperlukan guna mencapai hasil kerja yang optimal.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian terhadap permasalahan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan fungsi BAPPEDA dalam Proses perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Lampung Barat adalah melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan tingkat Desa/Kelurahan, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan, Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan yang terakhir Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten adalah sebagai penetapan.
2. Tinjauan *Fiqh Siyasah* dalam Mewujudkan Pelaksanaan fungsi Perencanaan pembangunan daerah di BAPPEDA Kabupaten Lampung Barat sudah berjalan sesuai dengan *fiqh siyasah* karena berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa BAPPEDA Kabupaten Lampung Barat telah menjalankan perannya sesuai dengan Keputusan Presiden No. 27 Tahun 1980. Hal tersebut dilihat dari peran BAPPEDA Kabupaten Lampung Barat dalam melakukan pembangunan yang juga disesuaikan dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah tahun 2017 yang dibuat oleh BAPPEDA mengarah kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah tahap ke dua (2017- 2022). Namun berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara, masih ada beberapa indikator yang belum berjalan dengan maksimal, seperti ketergantungan dana dari pusat menyebabkan tidak tepatnya jadwal penyusunan

Rencana Anggaran Pembangunan Daerah, karena penyusunan anggaran daerah bergantung kepada dana dari pusat.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan yang telah diuraikan diatas demi mencapai pelaksanaan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Lampung Barat yang lebih baik, penulis ingin memberikan saran yang mungkin berguna dalam rangka meningkatkan prestasi kerja pegawai diantaranya sebagai berikut :

1. Diharapkan bahwa pemerintah dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah sebaiknya lebih memperhatikan aspirasi-aspirasi publik, agar masyarakat lebih mempercayai semua keputusan yang dihasilkan oleh pemerintah tanpa hanya sekedar menjalankan kegiatan administratif dan seremonial dari kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah, demi tercapainya pembangunan daerah yang terpadu, terarah serta tepat sasaran.
2. Untuk mencapai pembangunan daerah yang terpadu, terarah serta tepat sasaran, BAPPEDA Kabupaten Lampung Barat supaya meningkatkan koordinasi dengan dinas dan instansi vertikal di daerah melalui *planning*, *monitoring* dan evaluasi pembangunan yang telah dilaksanakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abe Alexander. *Perencanaan Daerah Partisipatif*. Yogyakarta: Pustaka Jogja Mandiri, 2005.
- Abdulkadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Amri Darwis. *Metode Penelitian Pendidikan Islam: Pengembangan Ilmu Berparadigma Islami*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Bintaro Tjokroamidjojo. *Perencanaan Pembangunan*. Jakarta: PT. Gunung Agung, 1996
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahannya*. Bandung: Diponegoro, 2008.
- Djazuli. *Fiqh Siyasah*. Damascus: Dar al-Qalam, 2007.
- Handoko T. Hani. *Manajemen*. Yogyakarta: BAFE, 2003.
- Husaini Usman. *Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Ibnu Syarif, Mujaer dan Zada, Khamami. *Fiqh siyasah; Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Erlangga, 2008.
- Iqbal Hasan. *Pokok-Pokok Materi Metodologi dan Aplikasinya*. Bogor : Ghalia Indonesia, 2002.
- Inu Kencana Syafiie. *Menejemen Pemerintahan*. Jakarta: PT PERCA, 2007.
- Jalaludin Rahmat. *Metodologi Penelitian Komunikasi*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000.
- Juliansyah. *Metode Penelitian*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Joko Subagyo. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Kartini Kartono. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Bandung : Mandar Maju, 1996.

- Kontjaraningrat. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia, 1981.
- Michael P Todaro. *Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Bumi Aksara, 2000.
- Muhammad Iqbal. *Fiqh Siyasah; Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenada Media, 2014.
- Nanang Martono. *Metode Penelitian Sosial Konsep-konsep Kunci*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.
- Nurdin Usman. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Nurman. *Strategi Pembangunan Daerah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.
- Riyadi, Deddy Supriyadi Bratakusumah. *Perencanaan Pemabangunan Daerah (Strategi Menggali Potensi dalam Mewujudkan Otonomi Daerah)*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Setya Nugraha, Maulina. *Kamus Bahasa Indonesia*. Surabaya: Karina.
- Sondang P Siagian. *Administrasi Pembangunan*. Jakarta: Gunung Agung, 1983.
- Syarifudin Hidayat. *Metodologi Penelitian*. Bandung: Mandar Maju, 2002.
- Syaikh Ahafiyyurrahman al-mubarakfuri. *Syarh Tafsir Ibnu Katsir*. Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2011.
- Sugiono. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&R*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Susiadi AS. *Metodelogi Penelitian*. Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015.
- Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy. *Pengantar Hukum Islam*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Uno Hamzah B. *Perencanaan Pembelajaran*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006.
- Undang-undang Dasar 1945*. Bab VI, Pasal 18. Surabaya: Pustaka Agung Harapan.

Dokumentasi:

Keputusan Presiden No.27 Tahun 1980, Tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA).

Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan pembangunan Daerah.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Media:

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Badan_Perencanaan_Pembangunan_Daerah (diakses pada tanggal 04 februari 2018, pukul 19:00 WIB)

